

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT
PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE
2018-2022**

Skripsi

LULU IRMAYANTI
NPM: 1951010392



Program Studi Ekonomi Syari'ah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN
MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
PERIODE 2018-2022**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Program Studi: Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M. S. I

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, M. E. Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2024 M**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan layanan Pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu menghasilkan penurunan tingkat kemiskinan. Terdapat pemda yang mengalokasikan pengeluaran fungsi Pendidikan di bawah 20 persen dan pengeluaran fungsi Kesehatan di bawah 10 persen menjadi masalah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2018-2022 disertai dengan melihat perspektif dalam Ekonomi Islam.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan metode analisis data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan Provinsi Lampung tahun 2018-2022 jika mengalami peningkatan maka angka kemiskinan akan bertambah dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan Provinsi Lampung jika mengalami peningkatan maka angka kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung akan berkurang. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan Provinsi Lampung tahun 2018-2022 jika mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi kemiskinan Masyarakat di Provinsi Lampung. Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan memiliki prinsip *Al-Adl* (keadilan) menjalankan kebijakan adil dan Amanah seperti Pemda di Provinsi Lampung selalu meningkatkan kapasitas anggaran pengeluaran pemerintah dan fasilitas pelayanan bidang kesehatan sehingga kemiskinan di Provinsi Lampung dapat menurun setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Kemiskinan, Perspektif Islam.*

ABSTRACT

Poverty is a complex social problem and many factors cause poverty, one of which is the difficulty of obtaining education and health services. Increasing government spending does not always result in a decrease in poverty levels. There are local governments that allocated spending on the education function below 20 percent, and spending on the health function below 10 percent, which is a problem in poverty alleviation efforts. The aim this research is to stabilize whether government spending on education and health is affecting poverty in Lampung Province for 2018-2022 accompanied by looking at perspectives in Islamic Economics.

The method in this study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of documentation and literature study. The data used is in the form of secondary data with panel data analysis method.

The results of this research show that if government expenditure on education in Lampung Province in 2018-2022 increases, the poverty rate will increase and if government expenditure on health in Lampung Province increases, the poverty rate for the people of Lampung Province will decrease. Meanwhile, if government expenditure in the education and health sectors of Lampung Province in 2018-2022 increases, it will affect the poverty of the people in Lampung Province. Government expenditure in the fields of Education and Health has the principle of Al-Adl (justice) implementing fair and trustworthy policies such as the Regional Government in Lampung Province always increasing the capacity of the government expenditure budget and health service facilities so that poverty in Lampung Province can decrease every year.

Keywords: The government spending on education, The government spending on health, Poverty, Islamic Economics Perspective.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Irmayanti
NPM : 1951010392
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018- 2022” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis,



Lulu Irmayanti

NPM. 1951010392



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmtn, Bandar Lampung, 35131 | Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah
Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap
Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi
Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode
2018-2022**

**Nama : Lulu Irmayanti
NPM : 1951010392
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.
NIP. 197605292008012010

Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy
NIP. 201301091984102863

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Surabmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 7032899

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2022” disusun oleh **Lulu Irmayanti, NPM: 1951010392**, Program Studi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 22 Desember 2023**.

Tim Penguji

Ketua : Any Eliza, S. E., M. Ak 

Sekretaris : Alief Rakhman S, M. E 

Penguji I : Siska Yuli Anita, M. M 

Penguji II : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Julius Suryanto, S.E., M.M., Akt., C. A
NIP. 197009262008011000

MOTTO

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَعْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ ٧٢ ﴿

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”

(Q. S. Al- Ahzab: 72)



PERSEMBAHAN

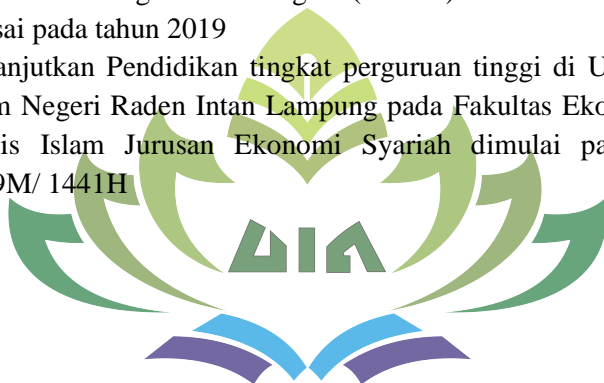
Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan rasa syukur serta segenap kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini sebagai bentuk rasa terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayah Eko Pratikno dan Ibu Sulasih yang telah senantiasa memberi semangat, motivasi, teladan, dukungan serta senantiasa selalu menyayangi dan memberikan yang terbaik demi keberhasilanku. Terima kasih atas segala untaian doa-doa yang Ayah dan Ibu curahkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebanyak apapun hal yang bisa saya berikan di kemudian hari tidak akan pernah cukup membayar segala pengorbanan, kasih sayang, dan kerja keras yang telah kalian curahkan sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kalian.
2. Adik – adikku tersayang, M. Idris Prabowo, M. Amar Prastyo, dan M. Syahrul Arjuna yang selalu menemani, memberikan semangat, pengorbanan, motivasi, dan doa yang tulus kepada saya sehingga dapat mencapai kesuksesan dan menjadi seseorang yang baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama lengkap Lulu Irmayanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Mei 2001. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan Eko Pratikno dan Sulasih. Berikut adalah daftar riwayat Pendidikan penulis:

1. Pendidikan dimulai dari TK Al-Azhar pada tahun 2006
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Way Huwi Lampung Selatan selesai pada tahun 2013
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019
5. Melanjutkan Pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2019M/ 1441H



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2022” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau.

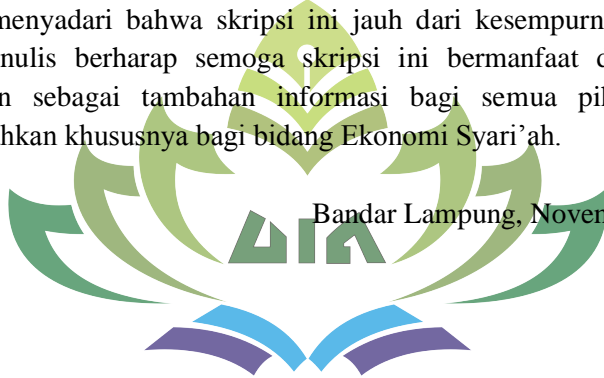
Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) pada program studi Ekonomi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan segala rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S. I. selaku Pembimbing I yang dengan tulus dan sabar telah meluangkan waktu serta tenaga memberikan perhatian, bimbingan dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
4. Okta Supriyaningsih, M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan usulan perbaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada seluruh Dosen, Staff Akademik, dan Pegawai Perpustakaan yang telah pelayanan yang baik untuk penulis

mendapatkan informasi dan sumber-sumber referensi, data dan lain-lain.

6. Kedua orangtuaku yang sangat saya sayangi, Ayah Eko Pratikno dan Ibu Sulasih juga Adik-adikku, M. Idris Prabowo, M. Amar Prastyo, dan M. Syahrul Arjuna, serta sahabat-sahabatku yang selalu menemani juga mendukungku sampai saat ini.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis.
8. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang selalu penulis banggakan yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak relasi untuk menjalin silaturahmi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi bidang Ekonomi Syari'ah.



Bandar Lampung, November 2023

Penulis

Lulu Irmayanti
NPM. 1951010392

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian	17
F. Manfaat Penelitian	17
G. Kajian Peneliti Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	27
A. Teori Kemiskinan	27
B. Teori Pengeluaran Pemerintah	43
C. Kerangka Berpikir	58
D. Pengajuan Hipotesis	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Waktu dan Tempat Penelitian	63
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	64

1. Populasi.....	64
2. Sampel.....	64
3. Pengumpulan Data.....	64
D. Definisi Operasional Variabel.....	65
1. Variabel Dependent (Y).....	65
2. Variabel Independent (X).....	65
E. Teknik Analisis.....	68
1. Analisis Regresi data panel.....	68
2. Pemilihan Model yang Tepat.....	69
3. Uji statistik.....	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	73
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	73
2. Kemiskinan.....	79
3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan.....	80
4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan.....	83
B. Analisis Data.....	86
1. Analisis Regresi Data Panel.....	86
2. Uji Normalitas.....	89
3. Uji Multikolinearitas.....	90
C. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian.....	93
BAB V PENUTUP.....	103
A. Simpulan.....	103
B. Rekomendasi.....	104
DAFTAR RUJUKAN.....	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Miskin	4
Tabel 1.2	Data Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	8
Tabel 1.3	Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Lampung Menurut Fungsi pada Realisasi APBD 2019	10
Tabel 1.4	Data Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Menurut Fungsi pada Realisasi APBD 2018-2022	13
Tabel 2.1	Indikator-Indikator Kemiskinan	29
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	66
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Provinsi Lampung.....	74
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Lampung Tahun 2022	75
Tabel 4.3	Jumlah Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2022	76
Tabel 4.4	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2022	78
Tabel 4.5	Persentase Kemiskinan Provinsi Lampung	79
Tabel 4.6	Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	81
Tabel 4.7	Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022	84
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Regresi CEM	86
Tabel 4.9	Hasil Estimasi Regresi FEM.....	87
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Regresi REM	87
Tabel 4.11	Hasil Uji Chow	87
Tabel 4.12	Hasil Uji Hausman	88
Tabel 4.13	Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch Pagan.....	88
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.15	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Random Effect Model....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Berpikir	58
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Eviews 10.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memberikan kejelasan dan pembatasan dalam permasalahan, penulis menjelaskan mengenai pembahasan proposal ini, maka penulis memberi adanya penjelasan dan deskripsi terkait penegasan judul untuk menjelaskan beberapa istilah dalam proposal ini. Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka beberapa istilah penting yang akan dijabarkan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antar apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.¹
2. Pengeluaran Pemerintah adalah kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.²
3. Belanja Pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan.³
4. Belanja Kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan.⁴

¹ Junierissa Marpaung, "Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan," *Kopasta: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* 5, No. 2 (2018): 55–64.

² Guritno Mangkoesobroto, "Ekonomi Publik," *BPFE, Yogyakarta*, 2001.

³ Muliza Muliza, Teuku Zulham, and Chenny Seftarita, "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 3, no. 1 (2017): 51–69.

⁴ Ibid.

5. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.⁵
6. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perlakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan di dasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁶

Berdasarkan penegasan istilah di atas dapat dirumuskan bahwa maksud dari judul skripsi ini dibuat adalah penelitian secara ilmiah untuk Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2022.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan fundamental utama yang menjadi indikator keefektifan program-program pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas karena juga terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan aspek lainnya di luar penghasilan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, salah satunya adalah kurangnya pendapatan karena sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan layanan Pendidikan dan kesehatan.⁷

Menurut UNDP terdapat tiga perspektif dalam mendefinisikan kemiskinan. Pertama, perspektif pendapatan mengukur kemiskinan berdasarkan penurunan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan secara finansial. Kedua, perspektif kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan materi dasar manusia yang diterima secara

⁵ Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018).

⁶ Abdul Kadir Riyadi Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁷ Suparlan Parsudi, "Kemiskinan Di Perkotaan," *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 1993.

sosial, termasuk makanan, kesehatan dasar, pendidikan, layanan penting, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang dianggap normatif. Ketiga, perspektif kapasitas yang mencerminkan ketidakmampuan dalam memiliki beberapa kemampuan dasar untuk berfungsi secara memadai.⁸

Ketidakmampuan dalam memperoleh pendidikan yang baik, minimnya akses kesehatan berkualitas, serta sulitnya untuk memperoleh kehidupan yang layak dapat mengarah pada rendahnya produktivitas, yang selanjutnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima. Kurangnya pendapatan akan kembali memperparah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan membentuk sebuah siklus kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan secara komprehensif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks dan sering terjadi di suatu wilayah. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, diperlukan pendekatan holistik yang mengatasi akar permasalahan kemiskinan dan memberikan prioritas pada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Hal ini mencakup investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja dan wirausaha. Program-program pengurangan kemiskinan dan jaring pengaman sosial juga dapat membantu masyarakat yang hidup dalam kemiskinan untuk keluar dari siklus kemiskinan.⁹

Suharto mengidentifikasi empat penyebab kemiskinan yang meliputi faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor struktural. Faktor individual dapat terjadi karena kondisi fisik atau kesehatan seseorang yang membatasi kemampuannya untuk bekerja dan berusaha. Faktor sosial terjadi akibat diskriminasi sosial yang dihadapi oleh seseorang. Faktor kultural terkait dengan perilaku buruk individu, seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan faktor struktural terjadi akibat

⁸ United Nations Development Programme UNDP, *World Youth Report* (New York: United Nations Development Programme, 2003).

⁹ Fanny Cantika Roseline and Emi Maimunah, "Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung," *Cakrawala Repositori IMWI* 5, no. 2 (2022): 227–40.

ketidakadilan sistem ekonomi yang memiskinkan orang.¹⁰ Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu, sedangkan faktor eksternal meliputi keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnnya penduduk miskin.¹¹

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan mengalami penurunan dibanding September 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang dan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Dari penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia tersebut, penyumbang tertinggi tingkat kemiskinan urutan keempat di Indonesia ada di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.002,41 ribu jiwa penduduk miskin atau sekitar 11,44% dari total penduduk Lampung (BPS Provinsi Lampung). Berikut disajikan data tentang keadaan penduduk miskin di Pulau Sumatera.



Tabel 1. 1
Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di
Pulau Sumatera Tahun 2018-2022

No	PROVINSI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceh	5.68	5.01	15.43	15.53	14.75
2	Bengkulu	15.41	14.91	15.30	14.43	14.34
3	Sumatera Selatan	12.82	12.56	12.98	12.79	11.95
4	Lampung	13.01	12.30	12.76	11.67	11.44
5	Sumatera Utara	8.94	8.63	9.14	8.49	8.33
6	Jambi	7.85	7.51	7.97	7.67	7.70
7	Riau	7.21	6.90	7.04	7.00	6.84

¹⁰ Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat," 2009.

¹¹ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Deepublish, 2017).

8	Sumatera Barat	6.55	6.29	6.56	6.04	6.04
9	Kep. Riau	5.83	5.80	6.13	5.75	6.03
10	Kep. Bangka Belitung	4.77	4.50	4.89	4.67	4.61

Sumber: Badan Pusat Statistik data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas persentase tingkat kemiskinan Provinsi Lampung menempati posisi ke 4 tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 11,44% pada tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tergolong tinggi dan perlu adanya tindakan dan pembinaan agar hal tersebut dapat teratasi. Persentase kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,46% dari tahun sebelumnya yaitu 12,30%. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi secara bertahap sudah banyak melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, adapun program-program pemerintah yang dilaksanakan antara lain program beasiswa, simantri, bedah rumah dan lain sebagainya, dengan harapan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut UU No. 13 tahun 2011 tentang Fakir Miskin, penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.¹² Berbagai program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah banyak dibuat namun kenyataannya program-program tersebut belum bekerja secara optimal. Artinya masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, pelayanan publik yang sulit

¹² Riska Aini, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb 9, No. 1 (2020).

dijangkau serta kesenjangan akan penguasaan sumber daya nantinya akan membuat kemiskinan berpotensi meningkat.¹³

Berdasarkan teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah menyatakan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Kewenangan yang diberikan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja perlu diprioritaskan dalam penyusunan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rambe dan Purmini variabel belanja pemerintah (E) secara signifikan berpengaruh negatif pada tingkat kemiskinan.¹⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bidang Pendidikan memainkan peranan penting dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan wujud dari investasi pemerintah guna meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di

¹³ Tri Angga Sigit And Ahmad Kosasih, "Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, No. 2 (2020): 105–119.

¹⁴ Roosemarina Anggraini Rambe and Purmini Purmini, "Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa," *Convergence: The Journal of Economic Development* 2, no. 1 (2020): 1–15.

Indonesia.¹⁵ Melalui pendidikan yang berkualitas, generasi muda yang berkualitas dapat terbentuk dan nantinya diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas pula. Sejak tahun 2009, pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20% dari APBD untuk sektor Pendidikan dan untuk sektor Kesehatan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan alokasi sebesar 10 persen dari APBD di luar gaji (*mandatory spending*).¹⁶ Di bawah ini merupakan data pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan Provinsi Lampung tahun 2022.



¹⁵ Endah Susanti, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur,” *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal* 4, no. 2 (2020): 25–34.

¹⁶ “UU No. 20 Tahun 2003,” n.d.

Tabel 1. 2
Data Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Menurut Fungsi
pada Realisasi APBD 2018-2022

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	2,712,583,880,570	2,757,056,389,564	3,003,290,487,789.63	2,927,972,001,881.42	1,845,111,097,364
Kab. Lampung Barat	296,857,503,313	305,239,923,800	286,095,553,121.00	297,934,295,249.00	331,078,690,898
Kab. Lampung Selatan	619,280,929,056	673,960,651,403	661,847,552,715.83	644,275,054,728.28	674,100,910,400
Kab. Lampung Tengah	888,446,142,851	909,436,779,415	873,176,226,588.00	918,768,593,070.00	1,015,494,529,316
Kab. Lampung Utara	530,364,207,514	570,915,345,110	500,465,462,586.47	493,492,301,902.00	562,968,392,311
Kab. Lampung Timur	748,447,211,955	781,359,157,366	706,513,827,306.00	751,142,446,919.00	807,591,040,803
Kab. Tanggamus	509,654,969,550	536,185,971,728	543,578,734,714.00	552,819,611,881.00	585,391,287,255
Kab. Tulang Bawang	266,287,028,462	312,090,056,258	296,239,525,419.00	306,295,592,338.76	338,936,733,397

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Way Kanan	364,425,550,996	393,625,982,076	406,161,473,295.46	386,228,124,590.57	430,684,049,725
Kota Bandar Lampung	748,329,904,027	705,775,031,688	642,866,746,146.10	642,740,880,481.80	619,727,538,668
Kota Metro	211,701,957,689	200,414,283,279	204,703,860,141.00	195,408,040,768.04	197,501,588,861
Kab. Pesawaran	392,450,690,463	419,745,388,071	408,010,650,841.00	399,288,138,518.00	441,580,329,282
Kab. Pringsewu	389,228,135,518	408,681,063,412	395,436,747,319.00	406,267,380,793.31	443,655,312,447
Kab. Mesuji	156,643,095,581	209,149,321,266	196,019,432,223.00	240,270,357,692.00	253,103,268,256
Kab. Tulang Bawang Barat	220,667,328,925	256,549,319,581	260,359,864,489.00	246,708,817,080.00	259,815,141,141
Kab. Pesisir Barat	160,214,941,004	194,093,741,374	195,904,271,793.00	173,756,031,714.00	189,564,984,105

Sumber: DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, yang berarti tidak selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari 16 (*enam belas*) Pemda dan Pemprov di Provinsi Lampung, terdapat 1 (*satu*) pemda yang rendah sekali mengalokasikan dana untuk urusan pendidikan. Pemda tersebut adalah Pesisir Barat. Kemudian terdapat 1 (*satu*) pemda yang mengalokasikan dana untuk urusan pendidikan dibawah 20 persen. Pemda tersebut adalah Tulang Bawang (18,10 persen). Pemerintah perlu mereview pengalokasian dana pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Pesisir Barat mengingat porsi anggaran pendidikan di kedua daerah tersebut rendah dan masih dibawah 20 persen. Penelitian yang dilakukan Hidayat menemukan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.¹⁷

Tabel 1. 3
Persentase Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Lampung Menurut Fungsi pada Realisasi APBD 2019

Nama Pemda	Fungsi Pendidikan	%	Fungsi Kesehatan	%
Provinsi Lampung	2,757,056,389,564	20%	550,208,465,493	9%
Kab. Lampung Barat	305,239,923,800	34%	166,975,801,838	18%
Kab. Lampung Selatan	673,960,651,403	34%	338,767,508,268	19%
Kab. Lampung Tengah	909,436,779,415	31%	239,027,304,337	21%
Kab. Lampung Utara	570,915,345,110	28%	207,197,889,052	24%
Kab.		25%	233,287,339,511	22%

¹⁷ Agustri Yogi Hidayat and Zul Azhar, "Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2022): 65–74.

Nama Pemda	Fungsi Pendidikan	%	Fungsi Kesehatan	%
Lampung Timur	781,359,157,366			
Kab. Tanggamus	536,185,971,728	49%	178,504,594,702	21%
Kab. Tulang Bawang	312,090,056,258	18%	164,155,901,442	17%
Kabupaten Way Kanan	393,625,982,076	26%	168,085,784,345	13%
Kota Bandar Lampung	705,775,031,688	31%	298,887,529,066	16%
Kota Metro	200,414,283,279	28%	250,074,499,429	17%
Kab. Pesawaran	419,745,388,071	30%	130,323,845,741	16%
Kab. Pringsewu	408,681,063,412	20%	145,857,110,489	15%
Kab. Mesuji	209,149,321,266	24%	89,069,943,692	13%
Kab. Tulang Bawang Barat	256,549,319,581	28%	89,414,019,464	18%
Kab. Pesisir Barat	194,093,741,374	21%	77,032,971,186	44%

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan Ditjen Kemenkeu RI 2023.

Rata-rata alokasi anggaran Kesehatan di wilayah Provinsi Lampung telah diatas 10 persen dari APBD, hanya Pemprov Lampung yang alokasi anggaran kesehatannya masih dibawah 10 persen. Kemudian Pengalokasian dana Kesehatan terendah ada di Pemda Tulang Bawang Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Septriani menunjukkan hasil bahwa variabel Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.¹⁸

¹⁸ Septriani, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2023).

Tabel 1. 4
Data Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Menurut Fungsi
pada Realisasi APBD 2018-2022

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	558,079,906,148	550,208,465,493	730,904,385,598.19	853,683,577,751.83	736,832,892,560
Kab. Lampung Barat	166,003,273,802	166,975,801,838	179,325,840,394.84	149,351,100,723.95	204,129,984,386
Kab. Lampung Selatan	270,264,257,086	338,767,508,268	398,385,536,976.97	416,195,254,692.68	390,312,790,025
Kab. Lampung Tengah	196,554,229,003	239,027,304,337	267,619,052,001.88	308,161,679,775.53	338,657,563,821
Kab. Lampung Utara	208,535,795,650	207,197,889,052	219,516,274,817.38	190,913,751,724.52	264,511,138,738
Kab. Lampung Timur	177,042,422,375	233,287,339,511	284,411,061,239.56	320,721,628,973.09	318,832,769,785
Kab. Tanggamus	148,660,652,741	178,504,594,702	204,406,773,097.62	218,816,961,366.00	267,728,212,850
Kab. Tulang Bawang	158,770,858,520	164,155,901,442	208,570,887,170.81	207,098,423,418.19	236,558,994,435
Kab. Way Kanan	159,170,349,387	168,085,784,345	369,250,021,773.25	181,156,490,351.15	217,598,978,311
Kota Bandar	282,565,067,59	298,887,529,066	278,742,359,533.90	311,954,813,166.40	355,333,548,573

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung	2				
Kota Metro	207,276,069,606	250,074,499,429	298,653,278,746.16	298,659,572,036.07	288,268,222,771
Kab. Pesa- waran	134,673,254,830	130,323,845,741	150,922,913,890.60	141,738,680,310.40	160,576,205,875
Kab. Pring-sewu	129,093,958,813	145,857,110,489	193,111,293,084.60	267,107,156,606.45	217,398,244,839
Kab. Mesuji	71,158,771,757	89,069,943,692	141,272,652,540.81	156,131,972,733.00	187,571,368,754
Kab. Tulang Bawang Barat	90,028,564,883	89,414,019,464	115,880,591,966.00	100,401,676,189.70	89,682,254,824
Kab. Pesisir Barat	75,907,615,375	77,032,971,186	101,613,616,136.94	89,880,051,804.28	102,154,779,200

Sumber: DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) 2023

Secara umum, kesehatan menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan terbukti cukup besar terhadap peningkatan kinerja sektor tersebut. Mengingat besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan kinerja dari kesehatan maka perlu adanya upaya secara bertahap dari pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya pada sektor kesehatan. Masih rendahnya kapasitas anggaran daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam sektor kesehatan menimbulkan implikasi masih harus dominannya pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan.

Pada hakikatnya pengeluaran pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial dan pelayanan umum yang layak serta mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pentingnya alokasi dana yang tepat dapat memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁹

Peran dari pemerintah dalam kebijakan fiskal ikut serta menekan angka kemiskinan penting untuk diselidiki lebih lanjut, terutama dalam penurunan kemiskinan di lima tahun terakhir sesuai fluktuasi tabel ditingkat penduduk miskin (2018-2022). Hal tersebut sungguh selaras dengan konsep ekonomi Islam yaitu terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu kewajiban negara atas hak rakyatnya adalah melayani dan mengurus urusan umat. Dijelaskan dalam Surah An-Nisa [4] ayat 58:

¹⁹ Susanti, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur."

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

﴿ ٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q. S. An-Nisa [4]: 58)

Dari kutipan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan kesejahteraan rakyatnya. Di mana negara membutuhkan peran seorang pemimpin yang amanah dalam mengimplementasikan kebijakan. Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada, pemimpin yang mempunyai karisma kuat untuk membangun daerahnya. Apalagi saat ini pemerintah daerah diberikan kelonggaran untuk mengalokasikan secara mandiri penerimaan daerah sehingga pembangunan lebih sesuai dengan tujuan otonomi daerah.²⁰

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2022.**

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang yang dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

²⁰ Adelia Herdaleny, “Analisis Kapasitas Fiskal Dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)(Analysis Fiscal Capacity and Roles against PDRB (a Case Study District/Cities in East Java),” n.d.

- a. Terdapat 4 Pemda di Prov Lampung yang masih rendah mengalokasikan anggaran pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan.
- b. Terdapat Pemda di Provinsi Lampung yang mengalokasikan pengeluaran bidang Pendidikan di bawah 20 persen dan pengeluaran fungsi Kesehatan di bawah 10 persen.
- c. Rendahnya alokasi anggaran Pemda di Provinsi Lampung di bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah upaya menetapkan batas-batas masalah penelitian agar lebih jelas, sehingga ditemukan masalah yang termasuk dan masalah yang tidak termasuk dalam penelitian. Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

- a. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan Kesehatan Provinsi Lampung. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan Provinsi Lampung.
- b. Data yang digunakan yaitu dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan secara berturut-turut selama 5 tahun (2018-2022)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung?

2. Apakah pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung?
3. Apakah pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung?
4. Apakah pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung berdasarkan persepektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dimunculkan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan terhadap kemiskinan masyarakat Lampung.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung
4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan dan Kesehatan secara simultan terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat Lampung tahun 2018-2022 ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan terlaksananya Penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan sumbangan pembaharuan pemikiran yang berguna sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis ini dan juga sebagai referensi perpustakaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan akan menambah bahan referensi dan juga dapat menjadi acuan bagi studi tentang analisis pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam mengentaskan kemiskinan atau penelitian yang sejenis.

b. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti mendapatkan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan mengenai pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan kesehatan.

G. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian diperlukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai referensi atau acuan dan perbandingan peneliti terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Septriani: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *random effect model* yang menunjukkan hasil bahwa variabel Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel belanja

perlindungan sosial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian variabel Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Fungsi Pendidikan, dan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.²¹

2. Meila Putri Aisyah Idris, Ghina Fatimatuz Zahro, Nuri Nugraheni, dan Aditya Kurniawan: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

Perbedaan: Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu metode analisis Regresi Linier Berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis data panel dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t, uji F, dan Uji Determinan (R^2) yang menunjukkan hasil bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemiskinan. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan berpengaruh negatif secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan.²²

²¹ Septriani, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, No. 1 (2023): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jep.v14i1.779>.

²²Meila Putri Aisyah Idris Idris et al., "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di

3. Agustri Yogi Hidayat dan Zul Azhar: Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode data panel dengan model random efek yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.²³

4. Annisa Marni Melati: Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data panel yang menunjukkan hasil bahwa variabel Belanja Fungsi

Daerah Istimewa Yogyakarta,” in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*, 2022.

²³Agustri Hidayat, “Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 4, No. 1 (2022): 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13308>.

Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kemiskinan. Variabel pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, dan pengeluaran bantuan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.²⁴

5. Ilhamatul Lathifah: Pengaruh IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Laju PDRB terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data panel menunjukkan hasil bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel laju PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2016-2020.²⁵

²⁴Annisa Marni Melati and Dian Imanina Burhany, "Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat," *Indonesian Accounting Research Journal* 1, no. 3 (2021): 422–30.

²⁵Ilhamatul Lathifah, "Pengaruh Ipm, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Laju PDRB Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah," *Jurnal Paradigma Multidisipliner* 2, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.1210/jpm.v2i4.146>.

6. Taruno: Analisis pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial terhadap kemiskinan.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data panel yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan kota tapi signifikan kemiskinan desa. Variabel pengeluaran perlindungan sosial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.²⁶

7. Adhitya Wardhana dan Bayu Kharisma: Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis data panel dengan pendekatan *fixed effect model* yang menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

²⁶Hendrawan Toni Taruno, "Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018," *The Indonesian Journal of Planning and Development* 4, no. 2 (2019): 49–56.

kemiskinan. Variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi dan angka melek huruf berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.²⁷

8. Themby O. M. Palenewen, Een N. Walewangko, dan Jacline I. Sumual: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Ipm Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data panel.

Perbedaan: Penelitian yang akan dilakukan ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi sederhana dan berganda menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan variabel sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.²⁸

²⁷ Adhitya Wardhana and Bayu Kharisma, "Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1343–66.

²⁸ Themby O M Palenewen, Een N Walewangko, and Jacline I Sumual, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018).

9. Dyah Puspitaning Ayu: Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.

Perbedaan: Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu metode analisis Regresi Linier Berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis data panel dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2018. Variabel pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018. Variabel tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018. Sedangkan secara simultan variabel belanja bantuan sosial, pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2018.²⁹

10. Rinanda Kinanti: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Persamaan: Terdapat pada variabel x yang digunakan yaitu Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.

Perbedaan: Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu metode analisis Regresi Linier

²⁹ Dyah Puspitaning Ayu, "Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018," *Independent: Journal Of Economics* 1, No. 1 (2021): 12.

Berganda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode analisis data panel dan penelitian yang akan dilakukan juga ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan *fixed effect model* (FEM) menunjukkan hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan yang paling dominan berpengaruh terhadap kemiskinan.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam memahami pembahasan yang ada pada skripsi secara menyeluruh, maka dikemukakan sistematika penulisan berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

a. Bagian awal skripsi

Pada bagian awal skripsi ini mencakup sampul depan (cover), halaman judul, halaman abstrak, persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pesembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar terlampir.

b. Bagian utama skripsi

Pada bagian utama skripsi ini mencakup beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan masalah, rumusan masalah,

³⁰ Rinanda Kinanti, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1, No. 2 (2018): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/Jiep.V1i2.1134>.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini terdiri atas beberapa sub bab yang mencakup landasan teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis dilakukan. dalam penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini diuraikan mengenai tata cara peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang didapatkan serta metode yang digunakan dalam penelitian skripsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran deskripsi data dan pembahasan hasil serta analisis penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan mengemukakan mengenai simpulan masalah yang terdapat pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan skripsi pada bagian saran berisi solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah dan kelemahan yang ada

c. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar isi dan daftarlampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Kemiskinan

Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrat.³¹

1. Teori Paradigma Neo-Liberal

Kemiskinan merupakan permasalahan individu yang disebabkan oleh kelemahan atau pilihan hidup yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila pasar diefektifkan dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan. Penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak bersifat sementara dan tidak hanya melibatkan keluarga, swadaya masyarakat atau lembaga keagamaan.³²

Paradigma neo-liberal digerakkan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan pendapatan nasional saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. *Income poverty* juga sangat mempengaruhi pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator.³³

2. Teori Paradigma Sosial Demokrat

Teori Sosial Demokrat kemiskinan bukan merupakan permasalahan individual, tetapi permasalahan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam Masyarakat akibat dari

³¹ Edi Suharto, *Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial* (2006).

³² Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Erlangga, 2017).

³³ Enny Febriana, "*Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Perdesaan: Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi*" (Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi, 2010).

terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber kemasyarakatan. Pendukung Sosial Demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan pra syarat penting dalam memperoleh kemandirian dalam kebebasan.³⁴

Kemandirian dan kebebasan akan tercapai jika setiap orang mampu menjangkau sumber-sumber untuk potensi dirinya seperti Pendidikan, Kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi kemasyarakatan, dimana Masyarakat dapat menentukan pilihan dan memenuhi kebutuhannya. Peran negara juga diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan.³⁵

Holtman mengemukakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh Masyarakat yang berkenaan dengan individu, kultur, Lembaga-lembaga sosial dan Masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan individu adalah kelemahan, biologis bawaan, ketidakmampuan memanfaatkan peluang ekonomi dan kualitas mental psikologis. Kelemahan biologis diperinci lagi menjadi masalah gen (yang sudah diwariskan dalam diri orang miskin), rendahnya intelegensi dan sakit mental. Mc Cleland menunjukkan mental sebagai faktor penentu suatu Masyarakat menjadi Masyarakat miskin dan terbelakang atau menjadi Masyarakat yang maju. Mc Cleland mengemukakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi manakala dalam suatu Masyarakat terdapat banyak warga yang bermental wiraswasta dengan motivasi tinggi untuk mencapai kemajuan.³⁶

³⁴ Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*.

³⁵ Enny Febriana, "Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Perdesaan : (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi)" (Universitas Indonesia, 2020).

³⁶ Hubertus Ubur, "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 2 (2011): 209–24.

a. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek materil saja, tetapi juga berhubungan dengan aspek non materil. Dengan demikian mengukur kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala pada dasarnya bersifat *integrated property*. Jadi kemiskinan bukan memiliki satu dimensi. Kaitannya dengan hal tersebut maka indikator kemiskinan dibagi menjadi dua kelompok yaitu, indikator ekonomi dan indikator sosial, baik secara fisik maupun non fisik.³⁷

Tabel 2. 1
Indikator-Indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan	Fisik	Non Fisik
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan lahan 2. Lahan Garapan 3. Kualitas rumah perabot rumah tangga 4. Sarana transport.³⁸ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan keluarga 2. Pengeluaran untuk perumahan 3. Pengeluaran untuk Pendidikan 4. Pengeluaran untuk Kesehatan.³⁹
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Pendidikan 2. Fasilitas Kesehatan 3. Fasilitas sampah 4. Fasilitas air bersih 5. Fasilitas sanitasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak buta huruf 2. Kesehatan ibu 3. Kesehatan balita 4. Penyerapan anak usia SD 5. Kegotongroyongan

Sumber: Rahardjo Adisasmita “Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah.”

Menurut Badan Pusat Statistik ada beberapa indikator kemiskinan, yaitu:

³⁷ Rahardjo Adisasmita, “Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah,” 2018.

³⁸ Ali Khomsan et al., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

³⁹ Farathika Putri Utami, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Samudra Ekonomika* 4, no. 2 (2020): 101–13.

1) Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan untuk makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁴⁰

2) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minuman dan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak).⁴¹

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minum untuk sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi perumahan, kebutuhan dasar diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Perhitungan:

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

⁴⁰ Raymond Raymond, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Propinsi Kepulauan Riau," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2017): 14–24.

⁴¹ M Chairul Arifin, *Buku Kamus Dan Rumus Peternakan & Kesehatan Hewan: Indonesia* (Gita Pustaka, 2018).

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

3) Presentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-PO) adalah presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (GK).

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.⁴²

5) Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.⁴³

Indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

⁴² Frans Salesman, *Potret Kesehatan Masyarakat Di Nusa Tenggara Timur* (Jakad Media Publishing, 2018).

⁴³ “Badan Pusat Statistik (Bps),” 2021, <http://www.bps.go.id>.%0a.

- 3) Tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga.
- 4) Kerentanan terhadap guncangan yang berasal dari individual maupun massa.
- 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia terbatasnya sumber daya alam.
- 6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial Masyarakat.⁴⁴

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kanbur dan Squire menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena dampak dari kebijakan pemerintah. Pemerintah yang pro-kemiskinan akan melakukan perbaikan di bidang kesehatan sehingga kesehatan akan meningkat, dan anak-anak sekolah akan bisa bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai skill yang selanjutnya membuat produktivitasnya meningkat dan pendapatannya meningkat. Produktivitas yang meningkat menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat dan angka kemiskinan akan berkurang. Namun apabila pemerintah tidak prokemiskinan, maka kesejahteraan rakyat miskin tidak akan dipedulikan. Fasilitas kesehatan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh pejabat tinggi dan orang-orang yang mempunyai uang.⁴⁵

Dibeberapa negara, pemerintah membuat kebijakan tanpa peduli dengan suara dan kepentingan masyarakat miskin. Mereka hanya memikirkan bagaimana memperkaya diri mereka sendiri. Menurut Rustanto Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi

⁴⁴ Malik, *Ekonomi Makro & Mikro*, 165.

⁴⁵ L Kanbur, R., & Squire, "The Evaluation of Thinking About Poverty. *Exploring The Interactions*," 2010.

kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Rendahnya taraf Pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- 2) Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- 3) Terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau sebatas usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- 4) Kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan tersolasi. Mereka hidup terpencil karena sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dapat dinikmati masyarakat lainnya.

Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat didaerah perdesaan. Karena pendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan

pendidikan yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja.⁴⁶

c. Teori Kemiskinan dalam Ekonomi Islam

Ibnu Hazm menyebutkan empat kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu makanan, minuman, pakaian dan perlidungan (rumah). Makanan dan minuman harus dapat memenuhi kesehatan dan energi. Pakaian harus dapat menutupi aurat dan melindungi seseorang dari udara dan dingin serta hujan. Rumah harus dapat melindungi seseorang dari berbagai cuaca dan juga memberikan tingkat kehidupan pribadi yang layak.⁴⁷

Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi daripada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran). Kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa dan berbagai pengaruh lain seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi.⁴⁸

Berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Ibnu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat yang wajib dipenuhi oleh orang kaya. Ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang yang lemah secara ekonomi. Salah satu pandangan Ibnu Hazm yang menarik dari masalah ini dapat dilihat bahwa, orang-orang kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang-orang fakir miskin

⁴⁶ Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

⁴⁷ Febri Kusuma, "PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM," n.d.

⁴⁸ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 262.

diantara mereka. Pemerintah harus memaksa hal ini terhadap mereka jika zakat dan harta kaum muslimin tidak cukup untuk mengatasinya. Orang fakir miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan semestinya, pakaian untuk musim dingin dan musim panas yang layak, dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.⁴⁹

Ibnu Hazm mendasarkan pandangannya tersebut pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 36:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُوبِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۗ﴾ (النساء/ ٤ : ٣٦)

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri”. (Q.S. An-Nisa: 36)⁵⁰

Tafsir dari Qur’an Surat An-Nisa ayat 36, yaitu ayat-ayat di atas yang berbicara tentang aturan dan tuntunan kehidupan rumah tangga dan harta waris, memerlukan tingkat kesadaran untuk mematuhi. Ayat ini menekankan kesadaran tersebut dengan menunjukkan perincian tempat tumpuan kesadaran itu dipraktikkan. Dan sembahlah Allah Tuhan yang menciptakan kamu dan pasangan kamu, dan janganlah

⁴⁹ Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 263.

⁵⁰ “Qur’ an Kemenag”.

kamu sekali-kali mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua, juga kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh walaupun tetangga itu nonmuslim, teman sejawat, ibnu sabil, yakni orang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain.⁵¹

Hak-hak yang diperintahkan Allah untuk dipenuhi orang kaya, dipahami Ibnu Hazm sebagai suatu kewajiban. Hak-hak yang mesti dipenuhi tersebut tidak lain merupakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan yang layak dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama-sama dalam mewujudkannya, demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Bagaimanapun juga, kemiskinan tidak pernah dikehendaki oleh siapapun. Orang miskin harus dibantu untuk bisa terbebas dari kemiskinan yang membelenggu.⁵²

d. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya walaupun dalam keadaan memiliki pekerjaan atau penghasilan.⁵³ Kemiskinan merupakan satu hal yang mampu

⁵¹ “Qur’ an Kemenag”.

⁵² Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 264

⁵³ Eupsi Isdanyo Istriana, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keuangan dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti yang terkandung dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7:

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ ۚ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ ٣ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ ٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ ٧ ﴾
(الماعون/١٠٧: ١-٧)

*"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan. (Al-Ma'un/107:1-7)"*⁵⁴

Surah Al-Ma'un ayat 1-7 bahwa kemiskinan itu berada semenjak manusia itu ada. Banyak manusia yang mengaku beragama dan sholat tetapi tidak ingin menolong orang yang lemah dan miskin termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidakmiskinan akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.⁵⁵

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Dalam sisi *supply*, Allah mengajarkan umat Islam untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng moral menghadapi kondisi

⁵⁴ "Qur'an Kemenag."

⁵⁵ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam* (Malang: UMM Pers, 2005).

yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Islam telah memberikan jawaban terhadap permasalahan kemiskinan tersebut. Sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ (النساء/٤: ٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka bertaqwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”
(An-Nisa/4:9)

Tafsir dari Qur'an Surat An-Nisa ayat 9, yaitu Setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan-nya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.⁵⁶

⁵⁶ “Qur'an Kemenag.”

Salah satu pesan moral yang disampaikan ayat ini adalah hendaknya orang-orang yang hidup saat ini berfikir dan merasa takut jika meninggalkan generasi yang lemah, makna lemah disini bukan hanya dari sisi kecukupan ekonominya saja, namun lebih dari itu, lemahnya intelektual, lemahnya jiwa sosial serta lemahnya keimanan terhadap nilai-nilai agama merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang hidup saat ini. Semua ini bertujuan agar terciptanya generasi yang memiliki rasa peduli tinggi terhadap peradaban umat yang lebih baik.

Rezeki yang berbeda diberikan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari sisi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda dilihat dari segi *demand*, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini dapat mencegah kecemburuan sosial dan mencukupi kebutuhan pokok kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.⁵⁷

Menurut Korayem dan Mashhour kemiskinan dalam ekonomi Islam diestimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*), barang siapa yang hidup di bawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin. Tingkat kecukupan dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syariah, yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁸ Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist pemikir ekonomi Islam mengemukakan indikator kemiskinan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut Taqiyuddin An-Nabani,

⁵⁷ Muhammad Nur Rohani, "Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam," 2014.

⁵⁸ Muhammad Iqbal, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 5*, no. 2 (2017).

diantara kebutuhan primer yaitu sandang, pangan dan papan secara layak. Pemikiran ini berlandaskan ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

(البقرة/۲: ۲۳۳)

“...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...
(Al-Baqarah/2:233)

Tafsir dari ayat di atas, yaitu Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah.⁵⁹

- 2) Berdasarkan Kebutuhan Pokok Materi dan Spiritual Menurut pemikiran dari Irfan Syauqi Beik, dalam melihat kemiskinan ia membagi tiga kebutuhan pokok manusia yaitu bisa melaksanakan ibadah, terpenuhi sandang, pangan dan papan, dan tidak adanya rasa takut. Hal ini berdasarkan pada surat Quraisy ayat 3-4.

﴿ فَالْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ ۓ الَّذِي ۖ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۚ ٥ ﴾

﴿ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۖ ۔ ﴾ (قریش/۱۰۶: ۳-۴)

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (Quraisy/106:3-4)

⁵⁹ “Qur' an Kemenag.”

Tafsir dari ayat di atas, yaitu Mereka pergi berniaga tiap tahun dengan aman dan sentosa. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini, yaitu Kakbah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima. Mereka pergi berniaga tiap tahun dengan aman dan sentosa. Oleh karena itu maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, dengan pengabdian yang hakiki dan tidak mempersekutukan-Nya, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima.⁶⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan tidak akan terjadi apabila kebutuhan pokok manusia bisa terpenuhi dan Allah telah menjamin setiap rezeki umatnya untuk terhindar kemiskinan dan ketakutan.

3) Garis Batas Nishab

Batas nishab menjadi indikator ekonomi Islam dalam melihat kemiskinan. Pemikir Islam berpendapat bahwa garis batas nishab berperan dalam menentukan kaya atau miskinnya seseorang. Skema Islam tentang zakat menjadi acuannya. Apabila harta yang dimiliki seseorang dalam setahunnya mencapai nishab (94 gram emas) maka yang bersangkutan dikategorikan sebagai orang kaya dan wajib mengeluarkan zakatnya dan berlaku sebaliknya untuk penerima zakat.⁶¹

Kemiskinan dalam persepektif Ekonomi Islam timbul karena berbagai sebab struktural.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ismail Ismail, "KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 110–34.

Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam. Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpastian dan kebakhilan kelompok kaya. Sehingga orang-orang yang miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi dan ekonomi di suatu tangan. Kelima, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.⁶²

Menurut KH. Ali Yafie, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan kemiskinan yang memelaratkan, yaitu:

- 1) Kelemahan, baik itu kelemahan hati dan semangat atau kelemahan akal dan ilmu atau kelemahan fisik. Semua itu dapat mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Kemalasan merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan oleh Islam sangat bertolak belakang dengan sifat kemalasan.
- 3) Ketakutan merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu

⁶² Husna Nimatul Ulya, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional," *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 129–53.

atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada dalam dirinya.

- 4) Kepelitan, sifat ini biasa terjadi kepada orang yang kaya dan tanpa disadari kepelitan tersebut tidak membantu mengurangi kemiskinan dan menempatkan dirinya menjadi sasaran untuk tidak disukai oleh orang miskin.
- 5) Terlilit hutang, terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati-hati jangan sampai terjerat oleh hutang, karena hutang sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang, maka sulit sekali bagi dirinya untuk keluar dari kemiskinan.
- 6) Diperas atau dikuasai sesama manusia. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya penderitaan dan kemelaratan, baik untuk perorangan maupun masyarakat, bangsa dan negara. Pemerasan oleh manusia yang kuat menimbulkan sistem perbudakan dan pemerasan oleh manusia yang kaya menimbulkan riba. Pemerasan pada tingkat masyarakat bangsa dan negara menimbulkan sistem kapitalisme.

B. Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Pengeluaran Pemerintah oleh Keynes dalam perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes memasukkan sektor 19 pemerintah dalam analisis ekonomi makronya. Menurut Neneke et al pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai

penyeimbang. Ini mencakup bidang-bidang seperti biaya berulang dan modal yang biasanya dikeluarkan pemerintah untuk pemeliharaan mereka sendiri dan ekonomi secara keseluruhan.⁶³

Teori Keynes mengenai pengeluaran pemerintah dilatarbelakangi gagasan umum bahwa pengangguran terus menerus berasal dari penurunan total sektor swasta. Menurut Wahyudi pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan meningkatkan total pengeluaran dalam perekonomian. Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pengeluaran pemerintah/investasi pemerintah secara langsung di berbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Investasi pemerintah pada kedua sektor publik tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan handal serta memperbaiki standar kehidupan sosial ekonomi Masyarakat.

Iftitah & Wibowo berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Keynes menjelaskan bahwa terbatasnya

⁶³ Simeon G Nenbee et al., "An Empirical Investigation of Government Spending in Primary School Enrolment and Poverty Reduction in Nigeria," *International Journal of Research in Humanities and Social Studies* 8 (2021): 16.

⁶⁴ Ndari Surjaningsih, G A Utari, and Budi Trisnanto, "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi," *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 14, no. 4 (2012): 389–420.

sumber daya anggaran menjadi alasan perlunya kebijakan keuangan belanja publik yang efektif dan efisien. Kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah merupakan alat kebijakan fiskal untuk memajukan perekonomian. Berikut beberapa teori mengenai pengeluaran pemerintah:⁶⁵

a) Teori Wagner

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi pemerintah. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organik mengenai pemerintah (*organik theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.⁶⁶

b) Teori WW Rostow dan RA Musgrave

WW Rostow dan RA Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Dalam suatu pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut Pembangunan terjadi peralihan

⁶⁵ Andi Eka Ifitah and Puji Wibowo, "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 1 (2022): 17–36.

⁶⁶ Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan* (Universitas Brawijaya Press, 2018).

aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave seperti halnya Wagner, menandai pendapatannya berdasarkan pengamatan pembangunan ekonom di banyak negara.⁶⁷

c) **Teori Peacock dan Wiseman**

Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara.

2. **Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, baik itu pendidikan formal atau informal. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang wajib disediakan oleh pemerintah. Menurut Michael P. Todaro, produktifitas suatu negara dapat meningkat jika pemerintah dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakatnya, dalam hal ini yaitu pendidikan.⁶⁸ Michael P. Todaro juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan termasuk dalam sasaran Pembangunan yang mendasar dari suatu negara. Pendidikan memberikan kontribusi bagi suatu negara dalam menyerap teknologi modern sehingga mampu mengembangkan kapasitas yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan serta Pembangunan yang berkelanjutan. Dari kapasitas tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan dan pembangunan secara

⁶⁷ Richat Tri Laksono, "Efektifitas Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember," *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 10, no. 2 (2016): 189–202.

⁶⁸ Michael P Todaro and Stephen C Smith, "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid 1," *Edisi Kedelapan, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.*

lebih luas, meningkatkan pengetahuan tentang cara bekerja demi memperoleh hasil yang lebih baik, meningkatkan keterampilan demi memperoleh alternatif usaha, dan kemampuan untuk berorganisasi, serta kemampuan memanfaatkan peluang seiring ekonomi tumbuh. Ketika seseorang menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi maka pengembalian pribadi yang diharapkan meningkat jauh lebih cepat daripada biaya pribadi.⁶⁹ Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan merupakan wujud dari investasi pemerintah guna meningkatkan kualitas pada sumber daya manusia. Pemerintah menyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai mana tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.⁷⁰ Dengan adanya pendidikan masyarakat akan memperoleh ilmu pengetahuan, kecakapan dan juga keterampilan. Dimana hal tersebut merupakan faktor dasar yang kita butuhkan untuk dapat bersaing dengan negara maju.

Menurut Hera Susanti dkk, bahwa pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial.

Dengan demikian, peningkatan pendidikan melalui pengeluaran pemerintah di suatu negara menjadi sangat penting bagi pembangunan negara tersebut. Pengeluaran

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ “UU No. 20 Tahun 2003.”

pemerintah bidang pendidikan digunakan untuk melihat capaiannya terhadap dimensi produktivitas individu.⁷¹

Indikator pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Alokasi dana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diantaranya digunakan untuk:⁷²

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana/gedung sekolah. Anggaran belanja digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah serta sarana dan prasaran yang mendukung untuk meningkatkan fasilitas pendidikan masyarakat.⁷³
- 2) Peningkatan pendidikan vokasi bidang industri, penelitian dan pengembangan Pendidikan.
Searah dengan kebijakan Presiden RI Jokowi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek), terus mendorong tercapainya visi nasional dalam mewujudkan SDM unggul, melalui peningkatan mutu pembelajaran vokasi di bidang industri kreatif. Upaya tersebut diwujudkan dengan meresmikan Pendidikan Tinggi Vokasi Multimedia Nusantara Polytechnic (MNP).
- 3) Bantuan pendidikan untuk siswa (beasiswa) dan lembaga pendidikan serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ketika masyarakat mendapat Bantuan Operasional Sekolah, sebagai contohnya wajib belajar

⁷¹ Enike T Y Dima and Beatrix Seran, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang," *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2020): 7–17.

⁷² M Abdul Aris, *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju Uu Cipta Kerja* (Muhammadiyah University Press, 2021).

⁷³ Jehuda Jean Sanny Mongan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 163–76.

12 tahun, maka masyarakat dapat mengenyam pendidikan minimal hingga 12 tahun (menamatkan SMA). Suksesnya program wajar 12 tahun turut meningkatkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung yang merupakan komponen pembentuk produktivitas individu.⁷⁴

Pendidikan dalam Islam sangatlah penting dan beliau telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadilah [58] ayat 11 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepadamu: ‘Bersikaplah luas dalam majelis, luaskanlah dirimu, niscaya Allah akan memberimu buah kelapa. Dan apabila dikatakan: ‘Berdirilah lalu berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Dia Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’” (QS. Mujadilah [58]:11).*⁷⁵

Dalam ayat di atas Allah SWT mempertegas bahwa ilmiah yang akan menolong manusia selama di dunia ilmu juga yang akan meningkatkan derajat manusia di muka bumi dan menghilangkan segala kesulitan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini.

⁷⁴ Agus Siswanto, “Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Bantul,” *Hanata Widya* 6, no. 7 (2017): 55–65.

⁷⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2023.

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara bertumpu pada kesehatan keberhasilan pendidikan yang baik. Menurut teori dalam buku Todaro & Smith berjudul Pembangunan Ekonomi, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan Kesehatan. Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas. Mills & Gilson mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan.
- 2) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
- 3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.

- 4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
- 5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Menurut Notoatmodjo keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.⁷⁶

Menurut teori dalam buku Michael P. Todaro & Smith berjudul *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar yaitu memperoleh fasilitas dan pelayanan Kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memberikan investasi Kesehatan dimana modal Kesehatan yang baik dapat memberikan kontribusi kepada setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁷⁷

Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan merupakan salah satu cara pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat. Perbaikan layanan kesehatan masyarakat merupakan bentuk investasi pada sumber daya manusia untuk dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pengeluaran Pemerintah pada bidang Kesehatan diatur dalam Undang-undang. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota

⁷⁶ Soekidjo Notoatmodjo, "Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan," Jakarta: *Rineka Cipta* 193 (2012).

⁷⁷ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga I* (Erlangga, 1999).

dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji.⁷⁸ Anggaran pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan hendaklah mampu menjamin hak kesehatan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang merata, memadai, bermutu serta terjangkau bagi kalangan masyarakat. Dengan terpenuhinya kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tentu akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk lebih produktif serta dapat meningkatkan pendapatannya.

Indikator pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Alokasi dana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan diantaranya digunakan untuk:

- 1) Pembangunan dan peningkatan/revitalisasi fasilitas kesehatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

Program pembangunan rumah revitalisasi puskesmas dan posyandu mendukung taraf kesehatan upaya preventif untuk terus menjaga kesehatan masyarakat. Anggaran yang digunakan tersebut berdampak pada peningkatan masyarakat dan mempertinggi usia harapan hidup masyarakat Lampung.

- 2) Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Bantuan Kesehatan Masyarakat

Anggaran kesehatan digunakan untuk membiayai penyediaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Peningkatan layanan JKN (*Jaminan Kesehatan Negara*) seperti kartu BPJS (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan*), pembangunan rumah sakit dan pendorongan pola hidup sehat. Ketika akses terhadap kesehatan, seperti JKN (*Jaminan Kesehatan Negara*) telah terpenuhi oleh subsidi pemerintah maka akan mampu membuat setiap individunya meningkatkan

⁷⁸ “UU No 36 Tahun 2009,” n.d.

derajat kesehatan setinggi-tingginya. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (PBI) bersumber APBN dan APBD per Kabupaten Kota di Provinsi Lampung terus meningkat. Di tahun 2018, peserta PBI APBN berjumlah 3.39 juta orang dan PBI APBD (*Kab/ Kota/ Provinsi*) berjumlah 404 ribu orang. Sementara di Tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 3.83 juta orang dan 874 ribu orang. Anggaran kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD) per kapita pada tahun 2020 secara provinsi sebesar Rp344.589,39 per orang. Bila dilihat berdasarkan kabupaten kota maka Kota Metro merupakan kota dengan anggaran per kapita tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.982.010,8 per kapita.

3) Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (*Germas*)

Program gerakan masyarakat hidup sehat (*Germas*) juga mendorong naiknya usia harapan hidup masyarakat. Belanja kesehatan tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah kesehatan di masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat diantaranya melalui program penyehatan lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

Dalam Islam konsep sehat yaitu mencakup tiga pilar, seperti firman Allah dalam surat As- Sajdah [32] ayat 9, sebagai berikut:

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ ۖ وَالْأَبْصَارَ ۚ
وَأَلْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)- Nya dan Dia jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS. As- Sajdah [32]:9)

Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati tujuannya adalah agar manusia dapat mendengar, melihat dan memahami kebenaran dan petunjuk. Karena sejatinya saat manusia dilahirkan ke dunia mereka tidak mengerti apa-apa dan dengan pendengaran, penglihatan dan hati yang sehat maka manusia dapat memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bekal hidupnya di dunia dan akhirat kelak.

4. Pengeluaran Pemerintah Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang diserahi amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta tersebut hanya bersifat sebagai "uang belanja" Sesungguhnya, keseluruhan harta secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan Masyarakat.⁷⁹ Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, peran pemerintah dalam Islam salah satunya adalah mengelola keuangan publik agar diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara bagi kepentingan umat yaitu untuk menggunakan keuangan tersebut dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan masyarakat. Jadi, sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim.

Ada dua jenis kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

⁷⁹ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

1. Mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi baik dalam kelompok sendiri, maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai oleh baitul mal.
2. Kebijakan dan tindakan yang dilakukan Nabi SAW dan keempat khalifah dengan mengeluarkan dana *baitul mal*.⁸⁰

Kedua jenis kebijakan ini dijelaskan pada bagian berikut untuk mengembangkan peran yang dimainkan setiap orang dalam pertumbuhan ekonomi dan masyarakat pada era permulaan Islam:

- 1) Penyebaran Islam.
- 2) Pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Pengembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Pengembangan infrastruktur.
- 5) Pembangunan armada perang dan penjaga keamanan.
- 6) Penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Enam prinsip umum berikut dapat dijabarkan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik (*peran pemerintah sebagai pembeli besar*):

- 1) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan masyarakat.
- 2) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan diatas penyediaan rasa tenang.
- 3) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan diatas kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
- 4) Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan menjatuhkan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

⁸⁰ H Adhiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 2007.

- 5) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- 6) Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.

5. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan

1) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Kemiskinan

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar karena merupakan investasi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, pendidikan sebagai sarana yang paling efektif dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiman salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, dimana pendidikan yang rendah akan menyebabkan individu kesulitan mendapat pekerjaan terutama pada sektor formal dimana pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik.⁸¹ Kesulitan masyarakat dalam menjangkau pendidikan yang tinggi terjadi karena masalah biaya pendidikan yang masih tinggi. Untuk itu pemerintah berkewajiban menyediakan kewajiban publik dimana pemerintah telah mengalokasikan dananya sebagai pendukung berbagai program pendidikan sebagai realisasi anggaran dari dana APBN.⁸² Semakin besarnya alokasi dana yang diberikan kemungkinan peningkatan pendidikan juga semakin meningkat sehingga pada gilirannya kemiskinan dapat menurun. Hal ini tidak akan terwujud

⁸¹ Arief Budiman, "Pengaruh Pengangguran, IPM, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2013" (UII Yogyakarta, 2015).

⁸² Adi Widodo, Waridin Waridin, and Johanna Maria Kodoatie, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011): 25–42.

tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan dan berbagai program memerlukan partisipasi masyarakat yang harus mendukung untuk hidup yang lebih baik. Dengan demikian alokasi anggaran pendidikan diharapkan peningkatan kualitas sumber daya melalui pendidikan dapat memajukan perekonomian dan pembangunan manusia sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

2) Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan

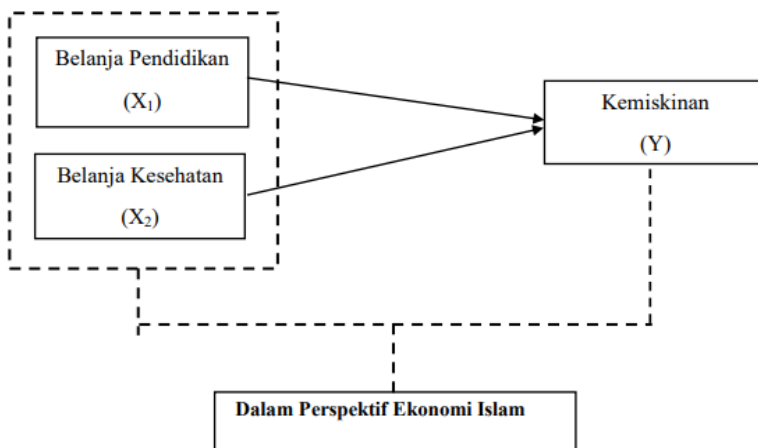
Menurut Suryawati kemiskinan sangat berhubungan dengan kematian dan kesehatan, dimana masyarakat yang miskin dan pendapatan di bawah garis kemiskinan cenderung memiliki kesempatan sedikit dalam memperoleh akses baik akses dalam kesejahteraan sosial maupun kesehatan.⁸³ Kesehatan sebagai modal dasar manusia dalam memperoleh pekerjaan Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan gizi akan memberikan peningkatan fisik, mental dan kecerdasan individu, Sehingga individu dapat melakukan aktivitasnya. Dalam sekema peningkatan pembangunan sumber daya manusia maupun ekonomi kesehatan juga berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas manusia. Tingkat kematian dan penyakit yang tinggi akan mendorong produktivitas tenaga kerja menurun hingga akhirnya menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pada akhirnya terjatuh dalam kemiskinan. Menurut Mongan Pengeluaran pemerintah untuk realisasi kesehatan dari kebijakan dan program pemerintah merupakan bentuk atau upaya dalam memperbaiki masalah kesehatan guna mendorong peningkatan produktivitas dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan meningkatnya pengeluaran untuk program-program kesehatan dan kesejahteraan

⁸³ Chriswardani Suryawati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8, no. 03 (2005).

dapat mengatasi masalah kesehatan dan pada akhirnya tingkat kemiskinan menurun.⁸⁴

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang masih banyak dihadapi oleh negara-negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat yaitu pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan. Memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas alur berpikir yang dikaji dalam perspektif ekonomi Islam, secara skema kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- = Berpengaruh Secara Parsial
 - - - - - = Berpengaruh Secara Simultan

Dalam gambar 2.1 ditunjukkan bahwa kemiskinan akan dipengaruhi oleh instrument pengeluaran pemerintah melalui

⁸⁴ Mongan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia."

anggaran di bidang Pendidikan dan Kesehatan, serta bagaimana perspektif Ekonomi Islam menjelaskan.

D. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan permasalahan di atas maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung.

Menurut teori Todaro, menyatakan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam sasaran pembangunan yang mendasar dari suatu negara. Pendidikan dimana memegang peranan penting bagi suatu negara dalam menyerap teknologi modern sehingga mampu mengembangkan kapasitas yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.⁸⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Puspitaning Ayu dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2018, pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018, menyatakan bahwasannya investasi bidang pendidikan mempunyai pengaruh kuat dengan output pekerja serta mampu menekan angka kemiskinan, artinya semakin rendah tingkat

⁸⁵ Dyah Puspitaning Ayu, “Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018,” *Independent: Journal Of Economics* 1, No. 1 (2021): 12.

pendidikan seseorang maka tingkat kemiskinan masyarakat disuatu wilayah akan semakin meningkat. Dan untuk variabel tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2018.⁸⁶

Melihat dari penelitian di atas, maka hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung

Berdasarkan teori pendukung dan meninjau dari hasil penelitian terdahulu, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena pendidikan memegang peranan menentukan kesejahteraan suatu rumah tangga, serta tingginya tingkat pendidikan akan memberi imbal hasil yang lebih tinggi pula. Dari hal tersebut, dapat dilakukan praduga semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kemiskinan disuatu wilayah akan semakin menurun.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Lampung

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Menurut Hossain, pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan program-program pemerintah dibidang

⁸⁶ Ibid.

kesehatan. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap pengentasan kemiskinan.⁸⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septriani dengan judul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan.⁸⁸ Dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Artinya semakin rendah kesehatan suatu masyarakat maka tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.

Melihat dari penelitian di atas, maka hipotesis kedua yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Belanja fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan teori pendukung dan meninjau dari hasil penelitian terdahulu, kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan karena manajemen yang tidak efektif, korupsi, atau masalah sistemik lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesehatan.

⁸⁷ Melati and Burhany, “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.”

⁸⁸ Septriani, “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2023).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah 16 daerah yang terdiri dari 13 Kabupaten, 2 Kota, dan 1 Provinsi di Lampung. Penelitian ini menggunakan daerah tersebut untuk dianalisis karena Provinsi Lampung sendiri merupakan daerah penyumbang tingkat kemiskinan tertinggi keempat sepuluh Sumatera berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Waktu atau periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi Penelitian dalam penelitan ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan antara variabel bebas yaitu pengeluaran Pemerintah pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.⁸⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang berbentuk panel dari setiap kabupaten, kota, dan Provinsi di Lampung dengan metode *time series*. Data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui perantara atau tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,

⁸⁹ V Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi" (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015).

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dimana data yang tersedia telah siap diolah secara langsung.⁹⁰

Data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Provinsi Lampung. Data yang diteliti meliputi kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan serta Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan dengan *time series* periode tahun 2018–2022.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan di tahun 2018-2022 di 16 daerah yang terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota, dan 1 provinsi di Lampung.

2. Sampel

Sampel dari penelitian ini sebanyak 240 sampel penelitian terdiri dari kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan di tahun 2018-2022 di 16 daerah yang terdiri dari 13 kabupaten, 2 kota, dan 1 provinsi di Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah metode penentuan sampel jika semua anggota populasi dipakai sebagai sampel penelitian.⁹¹

3. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang

⁹⁰ Megasari Gusandra Saragih et al., *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar Memulai Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁹¹ Rika Niswara, Muhajir Muhajir, and Mei Fita Asri Untari, “Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap High Order Thinking Skill,” *Mimbar PGSD Undiksha* 7, no. 2 (2019).

digunakan dapat berupa buku harian, surat laporan tahunan dan dokumen lainnya. Data-data ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kemenkeu.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi juga menggunakan kepastakaan. Teknik kepastakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁹²

D. Definisi Operasional Variabel

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Variabel Dependent (variabel terikat) dan Variabel Independent (variabel bebas). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependent (Y)

Tingkat Kemiskinan (Y) yaitu ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

2. Variabel Independent (X)

- a. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), adalah pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang berasal dari pembagian anggaran dari APBN maupun dari PAD Lampung. Yang kemudian dialokasikan kepada seluruh SKPD bidang pendidikan guna meningkatkan tingkat

⁹² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Alumni, 1976).

pendidikan masyarakat Lampung. Yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

- b. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X₂), yaitu pengeluaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah Lampung yang berasal dari APBN maupun PAD Lampung. Yang kemudian dialokasikan kepada seluruh SKPD bidang kesehatan guna meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Lampung. Yang digunakan adalah data pengeluaran pemerintah sektor kesehatan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Satuan
1.	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan	Alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. ⁹³	Jumlah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung di bidang Kesehatan tahun	Rupiah

⁹³ Jehuda Jean Sanny Mongan, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, No. 2 (2019): 163.

			2018-2022	
2.	Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan	Alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang Pendidikan. ⁹⁴	Jumlah alokasi dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung di bidang Pendidikan tahun 2018-2022	Rupiah
3.	Kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. ⁹⁵	Persentase Jumlah Penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak menurut 16 Provinsi di Lampung dari tahun 2018-2022	Persentase (%)

⁹⁴ Hidayat, "Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia."

⁹⁵ Raymond Raymond, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Kepulauan Riau," *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2017): 14–24.

E. Teknik Analisis

1. Analisis Regresi data panel

Data panel merupakan kumpulan data di mana perilaku unit *cross section* (misalnya individu, perusahaan, negara) yang diamati sepanjang waktu. Metode analisis regresi dengan data panel sesuai ketersediaan data yang terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung.

Dalam analisis regresi data panel, terdapat pemilihan model terbaik sebelum dilakukan estimasi lebih jauh pada data yang digunakan. Terdapat 3 permodelan pada data panel yang terdiri dari:⁹⁶

a. *Common Effect Model (CEM)*

CEM merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai kurun waktu. Persamaan CEM adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_1 + \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + \dots + \beta_k x_{kt} + u_{it} \quad 97$$

b. *Random Effect Model (REM)*

Metode ini digunakan untuk memilih estimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu dengan menggunakan asumsi bahwa setiap intersep berbeda, namun mengindikasikan intersep dalam variabel random.⁹⁸

Kelebihan dalam menggunakan pendekatan ini akan menghilangkan heteroskedastisitas. Metode yang digunakan dalam model regresi panel adalah *Generalized Least Square*.

⁹⁶ Damodar N Gujarati, "Basic Econometrics. Forth Edition," *Singapura: McGraw-Hill*, 2003.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA, 2018).

⁹⁸ Damodar N Gujarati, *Essentials of Econometrics* (SAGE Publications, 2021).

c. *Fixed Effect Model (FEM)*

Metode *fixed effect* mengasumsikan individu maupun koefisien dalam mengestimasi data panel model *Fixed Effect* menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep. Dimana perbedaan antar intersep yang mengasumsikan perbedaan antar objek dan antar waktu keunggulan dalam metode *fixed effect* yaitu memungkinkan terjadinya tidak sesuainya model dengan keadaan sesungguhnya.⁹⁹

2. Pemilihan Model yang Tepat

Dalam pemilihan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan beberapa uji pemilihan supaya model yang tepat sesuai dengan estimasi serta nilai regresi yang baik.

a. Uji Chow (Chow Test)

Pengujian ini digunakan untuk menentukan *common effect model* atau *fixed effect model* yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel. Jika nilai Prob. $> \alpha$, maka H_0 diterima, atau dengan kata lain model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*, sebaliknya jika nilai Prob. $< \alpha$, maka H_0 ditolak, atau model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.¹⁰⁰

H_0 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Common Effect Model*

H_a : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

b. Uji Hausman

Pada uji Hausman merupakan pemilihan estimasi model yang terbaik antara *fixed effect model* dengan

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Muhammad Iqbal, "Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis," *Blog Dosen Perbanas 2* (2015): 1–7.

random effect model, jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka menolak H_0 yang artinya model terbaik adalah *fixed effect*, sedangkan bila nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritis maka menerima H_0 artinya model terbaik *Random Effect*, Berikut ini hipotesis dari uji hausman:¹⁰¹

H_0 : Estimasi model lebih baik menggunakan *Random Effect Model*

H_a : Estimasi model lebih baik menggunakan *Fixed Effect Model*

3. Uji statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel- variabel. Uji statistik yang akan digunakan adalah uji t, uji f, uji R^2 . Berikut penjelasannya:

a. Uji t

Uji t merupakan uji parsial atau individu dimana tujuan metode ini untuk menguji seberapa berpengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian dapat menjelaskan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya.¹⁰² Dengan pengambilan keputusan didasarkan atas nilai propabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program Eviws 10 yaitu:

1) Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan

$H_0: \beta_1 > 0$, artinya Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tidak ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)* (Guepedia, 2021).

$H_a: \beta_1 < 0$, artinya Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2) Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

$H_0: \beta_1 > 0$, artinya Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan tidak ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan

$H_a: \beta_1 < 0$, artinya Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan ada pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji f merupakan pengujian kelayakan model uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Nilai probabilitas = 0.05 jika nilai probabilitas ($\leq 0,05$) maka akan menolak H_0 jika nilai probabilitasnya lebih besar dari ($\geq 0,05$) maka akan menerima H_0 . Berikut hipotesis uji f.¹⁰³

$H_0: \beta_1 > 0$ artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a: \beta_1 < 0$, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Metode koefisien determinasi atau R² biasa digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen jika nilai koefisien 0 maka variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dan jika

¹⁰³ Ibid.

koefisien =1 maka variabel dependen dapat di jelaskan oleh variabel independen.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan: Timur-Barat berada antara 103 40' - 105°50' Bujur Timur dan Utara-Selatan berada antara 6°45' 3°45' Lintang Selatan. Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung Tenggara Pulau Sumatera, dan dibatasi oleh:

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara.
- b. Selat Sunda, di sebelah Selatan.
- c. Laut Jawa, di sebelah Timur.
- d. Samudera Indonesia di sebelah Barat.

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung Karang - Kotamadya Tanjung Karang Teluk Betung Selanjutnya - Teluk Betung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 227 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.449 desa. Berikut di bawah ini perincian pembagian wilayah provinsi Lampung beserta luas wilayahnya.

Tabel 4. 1
Pembagian Wilayah Provinsi Lampung

Kabupaten	Ibukota	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Kecamatan
Lampung Barat	Liwa	2116.01	15
Tanggamus	Kota Agung	2901.98	20
Lampung Selatan	Kalianda	2218.84	17
Lampung Timur	Sukadana	3867.43	24
Lampung Tengah	Gunung Sugih	4548.93	28
Lampung Utara	Kotabumi	2656.39	23
Way Kanan	Blambangan Umpu	3531.10	15
Tulang Bawang	Menggala	3107.47	15
Pesawaran	Gedong Tataan	1279.60	11
Pringsewu	Pringsewu	614.97	9
Mesuji	Mesuji	2200.51	7
Tulang Bawang Barat	Panaragan	1281.45	9
Pesisir Barat	Krui	2993.80	11
Bandar Lampung	Bandar Lampung	183.72	20
Metro	Metro	73.21	5

Sumber: BPS. Provinsi Lampung dalam Angka 2023

Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun 2022 sebanyak 9.176.546 jiwa yang terdiri atas 4.697.217 jiwa penduduk laki-laki dan 4.479.329 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2022 September, penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104. Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 273 jiwa/Km². Kepadatan Penduduk di 15

kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung dengan kepadatan sebesar 6.585 jiwa/Km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 55 jiwa/Km².

Jumlah Penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai 4.387.966 jiwa dari 6.560.252 penduduk dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Agustus 2022 mencapai 95,48 dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 207.965 jiwa. Berikut tabel di bawah ini merupakan rincian Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Provinsi Lampung tahun 2022.

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Lampung Tahun 2022

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Presentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran (Jiwa)	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	
≤ SD	1.771.101	49.832	1.820.933	97,26
SMP	1.029.867	37.066	1.066.933	96,53
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.215.503	100.458	1.315.961	92,37
Perguruan Tinggi	371.495	20.609	392.104	94,74
Jumlah Total	4.387.966	207.965	4.595.931	95,48

Sumber: BPS. Provinsi Lampung dalam Angka 2023

Dalam merencanakan serta mengevaluasi sektor pembangunan diperlukan data mengenai kependudukan. Terutama jika dikaitkan dengan fungsi ganda penduduk

dalam sebuah proses pembangunan yakni sebagai subjek dan objek. Fungsi penduduk sebagai subjek adalah penduduk pelaku pembangunan, sedangkan fungsi penduduk sebagai objek yakni menjadi target dan sasaran Pembangunan. Keduanya dapat terlaksana apabila berjalan seiring dan sejalan secara terpadu. Hasil pembangunan harus bertujuan akhir memberikan kesejahteraan pada penduduk, namun untuk mencapai tujuan tersebut penduduk pula yang akan menjadi roda penggeraknya. Tingkat produktivitas atau kompetensi seseorang sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang cerdas dan terampil yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif. Dalam upaya meningkatkan kualitas manusia yang cerdas dan terampil, maka Provinsi Lampung terus meningkatkan pelayanan dengan upaya pengadaan berbagai fasilitas pendidikan. Tabel 4.3 di bawah ini merupakan rincian jumlah tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan Provinsi Lampung tahun 2022.

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Pendidik dan Fasilitas Pendidikan
Provinsi Lampung Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Tenaga Pendi- dik	TK/ RA	SD/ MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	PTN/ PTS
Lampung Barat	5.278	132	247	85	33	10	0
Tanggamus	9.819	256	465	130	48	26	3
Lampung Selatan	26.074	312	627	255	99	57	9
Lampung Timur	16.689	563	698	274	83	70	6
Lampung Tengah	20.437	627	827	312	124	72	7
Lampung Utara	11.986	311	495	175	90	28	10

Kabupaten/ Kota	Tenaga Pendi- dik	TK/ RA	SD/ MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	PTN/ PTS
Way Kanan	8.182	193	535	121	58	25	2
Tulang Bawang	6.643	195	250	128	39	28	3
Pesawaran	8.088	192	391	122	43	15	3
Pringsewu	7.95	153	301	90	33	34	8
Mesuji	3.772	130	149	73	21	18	2
Tulang Bawang Barat	4.859	147	192	75	29	18	2
Pesisir Barat	3.653	85	140	57	19	4	1
Bandar Lampung	19.806	394	302	166	82	62	36
Metro	5.208	73	72	38	27	21	15
Jumlah Total	158.444	3.763	5.691	2.101	828	488	107

Sumber: BPS. Provinsi Lampung dalam Angka 2023

Dalam upaya meningkatkan fasilitas kesehatan didalam mengatasi masalah kesehatan maka Provinsi Lampung terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan upaya pengadaan berbagai sarana dan prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit, puskesmas, klinik pratama, posyandu dan poskesdes.

Tabel 4. 4
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas
Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022

Kabupa- ten/ Kota	Tenaga Keseha- tan	Ru- mah Sakit	Pus- kes- mas	Klinik Prata- ma	Po- syandu	Pos- kes- des
Lampung Barat	1.316	2	18	5	262	61
Tanggamus	1.607	2	24	19	693	93
Lampung Selatan	2.730	6	28	66	1.047	167
Lampung Timur	2.371	5	34	14	1.304	267
Lampung Tengah	3.750	10	39	44	1.567	125
Lampung Utara	2.648	6	27	32	635	162
Way Kanan	1.780	3	20	14	430	106
Tulang Bawang	1.147	4	20	10	303	47
Pesawaran	1.403	3	15	11	445	100
Pringsewu	2.080	8	13	23	414	51
Mesuji	883	2	14	6	137	139
Tulang Bawang Barat	1.195	2	16	10	196	30
Pesisir Barat	838	1	11	0	123	38
Bandar Lampung	7.677	20	31	88	704	0
Metro	2.482	9	11	20	156	0
Jumlah Total	33.907	83	321	362	8.416	1.386

Sumber: BPS. Provinsi Lampung dalam Angka 2023

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mengakses berbagai macam sumberdaya, memanfaatkan peluang-peluang yang menjadi haknya, bukan sekedar ketidakmampuan ekonomi saja, namun juga tidak terpenuhinya *basic needs* seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, adanya perasaan aman, akses air bersih dan adanya hak berpartisipasi dalam politik dan kehidupan sosial.

Tabel 4. 5
Persentase Kemiskinan Provinsi Lampung

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	13.54	12.92	12.52	12.82	11.71
Tanggamus	12.48	12.05	11.68	11.81	10.98
Lampung Selatan	14.86	14.31	14.08	14.19	13.14
Lampung Timur	15.76	15.24	14.62	15.08	13.98
Lampung Tengah	12.62	12.03	11.82	11.99	10.96
Lampung Utara	20.85	19.90	19.30	19.63	18.41
Way Kanan	13.52	13.07	12.90	13.09	11.76
Tulang Bawang	9.70	9.35	9.33	9.67	8.42
Pesawaran	15.97	15.19	14.76	15.11	13.85
Pringsewu	10.50	10.15	9.97	10.11	9.34
Mesuji	7.55	7.47	7.33	7.54	6.84
Tulang Bawang Barat	8.10	7.75	7.39	8.32	7.44
Pesisir Barat	14.98	14.48	14.29	14.81	13.84
Bandar Lampung	9.04	8.71	8.81	9.11	8.21
Metro	9.14	8.68	8.47	8.93	7.87
Provinsi Lampung	13.14	12.62	12.34	12.62	11.57

Sumber: BPS. Provinsi Lampung dalam Angka 2023

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari penelitian bidang Pendidikan. Meningkatnya anggaran Pendidikan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka anggaran belanja fungsi pendidikan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat Pendidikan Masyarakat. Belanja Pendidikan ini diukur dengan menggunakan anggaran belanja menurut fungsi Pendidikan dalam satuan miliar. Adapun total anggaran pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan di wilayah provinsi Lampung tahun 2018-2022 sebagai berikut:



Tabel 4. 6
Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	2,712,583,880,570	2,757,056,389,564	3,003,290,487,789.63	2,927,972,001,881.42	1,845,111,097,364
Kab. Lampung Barat	296,857,503,313	305,239,923,800	286,095,553,121.00	297,934,295,249.00	331,078,690,898
Kab. Lampung Selatan	619,280,929,056	673,960,651,403	661,847,552,715.83	644,275,054,728.28	674,100,910,400
Kab. Lampung Tengah	888,446,142,851	909,436,779,415	873,176,226,588.00	918,768,593,070.00	1,015,494,529,316
Kab. Lampung Utara	530,364,207,514	570,915,345,110	500,465,462,586.47	493,492,301,902.00	562,968,392,311
Kab. Lampung Timur	748,447,211,955	781,359,157,366	706,513,827,306.00	751,142,446,919.00	807,591,040,803
Kab. Tanggamus	509,654,969,550	536,185,971,728	543,578,734,714.00	552,819,611,881.00	585,391,287,255
Kab. Tulang Bawang	266,287,028,462	312,090,056,258	296,239,525,419.00	306,295,592,338.76	338,936,733,397
Kab. Way Kanan	364,425,550,996	393,625,982,076	406,161,473,295.46	386,228,124,590.57	430,684,049,725

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Bandar Lampung	748,329,904,027	705,775,031,688	642,866,746,146.10	642,740,880,481.80	619,727,538,668
Kota Metro	211,701,957,689	200,414,283,279	204,703,860,141.00	195,408,040,768.04	197,501,588,861
Kab. Pesawaran	392,450,690,463	419,745,388,071	408,010,650,841.00	399,288,138,518.00	441,580,329,282
Kab. Pringsewu	389,228,135,518	408,681,063,412	395,436,747,319.00	406,267,380,793.31	443,655,312,447
Kab. Mesuji	156,643,095,581	209,149,321,266	196,019,432,223.00	240,270,357,692.00	253,103,268,256
Kab. Tulang Bawang Barat	220,667,328,925	256,549,319,581	260,359,864,489.00	246,708,817,080.00	259,815,141,141
Kab. Pesisir Barat	160,214,941,004	194,093,741,374	195,904,271,793.00	173,756,031,714.00	189,564,984,105

Sumber: DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi, yang berarti tidak selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Lampung masih kurang serius dalam memperhatikan Pendidikan. Pemerintah masih kurang menyadari peran anggaran di bidang Pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan merupakan komponen penting untuk mencapai SDGs.

4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan merupakan bagian dari pengeluaran daerah yang diklasifikasikan menurut fungsinya dengan tujuan untuk meningkatkan output dari penelitian bidang kesehatan. Meningkatnya anggaran kesehatan serta pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran maka anggaran belanja fungsi kesehatan tentunya akan meningkat, bahkan berdampak pada semakin tingginya tingkat kesehatan Masyarakat. Belanja kesehatan ini diukur dengan menggunakan anggaran belanja menurut fungsi kesehatan dalam satuan miliar. Adapun total anggaran pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di wilayah provinsi Lampung tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Lampung	558,079,906,148	550,208,465,493	730,904,385,598.19	853,683,577,751.83	736,832,892,560
Kab. Lampung Barat	166,003,273,802	166,975,801,838	179,325,840,394.84	149,351,100,723.95	204,129,984,386
Kab. Lampung Selatan	270,264,257,086	338,767,508,268	398,385,536,976.97	416,195,254,692.68	390,312,790,025
Kab. Lampung Tengah	196,554,229,003	239,027,304,337	267,619,052,001.88	308,161,679,775.53	338,657,563,821
Kab. Lampung Utara	208,535,795,650	207,197,889,052	219,516,274,817.38	190,913,751,724.52	264,511,138,738
Kab. Lampung Timur	177,042,422,375	233,287,339,511	284,411,061,239.56	320,721,628,973.09	318,832,769,785
Kab. Tanggamus	148,660,652,741	178,504,594,702	204,406,773,097.62	218,816,961,366.00	267,728,212,850
Kab. Tulang Bawang	158,770,858,520	164,155,901,442	208,570,887,170.81	207,098,423,418.19	236,558,994,435

PEMDA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Way Kanan	159,170,349,387	168,085,784,345	369,250,021,773.25	181,156,490,351.15	217,598,978,311
Kota Bandar Lampung	282,565,067,592	298,887,529,066	278,742,359,533.90	311,954,813,166.40	355,333,548,573
Kota Metro	207,276,069,606	250,074,499,429	298,653,278,746.16	298,659,572,036.07	288,268,222,771
Kab. Pesawaran	134,673,254,830	130,323,845,741	150,922,913,890.60	141,738,680,310.40	160,576,205,875
Kab. Pringsewu	129,093,958,813	145,857,110,489	193,111,293,084.60	267,107,156,606.45	217,398,244,839
Kab. Mesuji	71,158,771,757	89,069,943,692	141,272,652,540.81	156,131,972,733.00	187,571,368,754
Kab. Tulang Bawang Barat	90,028,564,883	89,414,019,464	115,880,591,966.00	100,401,676,189.70	89,682,254,824
Kab. Pesisir Barat	75,907,615,375	77,032,971,186	101,613,616,136.94	89,880,051,804.28	102,154,779,200

Sumber: DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan di 5 tahun terakhir rata-rata mengalami kenaikan seperti di Pemda Lampung Tengah, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Mesuji, dan Pesisir Barat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Lampung serius dalam memperhatikan Kesehatan Masyarakat dengan terus meningkatkan anggaran belanja bidang Kesehatan, meski sempat mengalami penurunan di beberapa pemda namun Kembali naik demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

B. Analisis Data

1. Analisis Regresi Data Panel

Langkah yang dilakukan sebelum memulai analisis data panel adalah melakukan pemilihan model yang tepat sebelum melakukan estimasi regresi data panel. Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

a. Common Effect Model

Tabel 4. 8
Hasil Estimasi Regresi CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.795768	16.90689	-0.283658	0.7774
LOG(X1)	2.79939	0.834524	3.354475	0.0012
LOG(X2)	-2.238745	1.061084	-2.109866	0.0381

Sumber: output Eviews 10 (data diolah tahun 2023)

b. Fixed Effect Model

Tabel 4. 9
Hasil Estimasi Regresi FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	55.66941	18.3713	3.030238	0.0036
LOG(X1)	-0.205371	0.754244	-0.272288	0.7863
LOG(X2)	-1.465357	0.31669	-4.627104	0

Sumber: Output Eviews 10 (data diolah tahun 2023)

c. Random Effect Model

Tabel 4. 10
Hasil Estimasi Regresi REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.58412	16.0897	2.460215	0.0161
LOG(X1)	0.451702	0.663122	0.681174	0.4978
LOG(X2)	-1.524597	0.313853	-4.857679	0.0000

Sumber: output Eviews 10 (data diolah tahun 2023)

Dari ketiga model tersebut dilakukannya pengujian untuk memilih model yang tepat dan terbaik dengan pengujian, sebagai berikut:

1) Uji Chow

Untuk menentukan model yang tepat dalam penelitian ini, dapat digunakan Uji Chow. Uji ini digunakan untuk memilih antara model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* (FEM) dalam mengolah data panel. Dari Uji Chow yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	193.242878	(15,62)	0.0000
Cross-section Chi-square	309.282194	15	0.0000

Sumber: Output Eviews 10 (2023)

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai Prob. $0.0000 < 0.05$. Maka hasil Uji Chow menyatakan model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2) Hasil Uji Hausman

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang paling tepat digunakan. Dari Uji Hausman yang dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Hausman

	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.370921	2	0.1854

Sumber: Output Eviews 10 (2023)

Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai Prob yang didapatkan sebesar 0,1854 artinya nilai Prob. > 0.05 . Maka H_0 diterima dan model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM).

3) Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch Pagan

Karena adanya inkonsistensi hasil antara Uji Chow dan Uji Hausman, maka diperlukan satu pengujian lagi, yakni *Lagrange Multiplier Breusch Pagan Test*, dengan output sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch Pagan

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	149.5579 (0.0000)	1.608764 (0.2047)	151.1667 (0.0000)
Honda	12.22939 (0.0000)	-1.26837 (0.8977)	7.750609 (0.0000)
King-Wu	12.22939 (0.0000)	-1.26837 (0.8977)	4.484251 (0.0000)

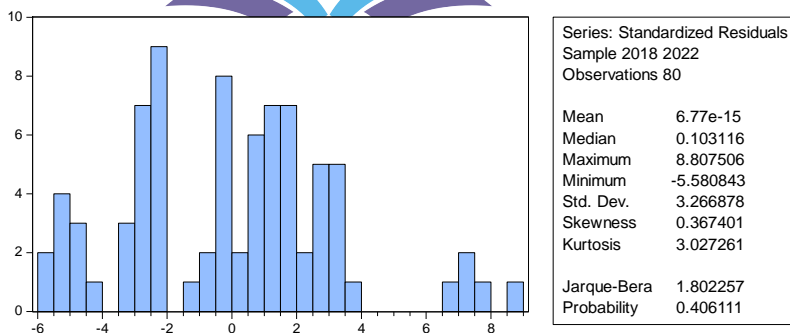
GHM	--	--	149.5579
	--	--	(0.0000)

Sumber: Output Eviews 10 (2023)

Nilai P value ditunjukkan oleh angka di dalam tanda kurung yaitu sebesar 0,000 dimana nilainya kurang dari 0,05, sehingga LM Test ini menunjukkan bahwa menerima H_1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah *Random Effect Model (REM)*.

2. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang layak digunakan dalam penelitian adalah data yang terdistribusi secara normal. Pengambilan keputusan terdistribusi secara normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai probabilitas dengan alpha 5% (0,05). Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka terdistribusi secara normal. Dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Eviews 10

Berdasarkan hasil output uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual pada nilai probabilitas sebesar $0,406111 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal.

3. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi atau tidak antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila terjadi multikolinieritas di antara semua variabel bebas, akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila Nilai Centered VIF < 10 , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Multikolinieritas

	(X1)	(X2)
(X1)	1.000000	0.791514
(X2)	0.791514	1.000000

Sumber: *Output Eviews 10 (data diolah tahun 2023)*

Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas, koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar $0,791514 < 10$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4) Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Metode yang digunakan untuk menganalisis pengaruh belanja Pendidikan dan belanja kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Provinsi Lampung adalah metode regresi data panel. Setelah melalui uji chow, uji hausman, dan uji LM telah dilakukan untuk menemukan model analisis terbaik diantara 3 model yang ditawarkan dalam regresi data panel. Berdasarkan ketiga uji tersebut maka ditetapkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Hasil estimasi regresinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Estimasi Regresi Data Panel Random Effect Model

Sumber: Output Eviews 10 (2023)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.58412	16.0897	2.460215	0.0161
LOG(X1)	0.451702	0.663122	0.681174	0.4978
LOG(X2)	-1.5246	0.313853	-4.85768	0
R-squared	0.249341	Mean dependent var		0.8048
Adjusted R-squared	0.229844	S.D. dependent var		46
S.E. of regression	0.494212	Sum squared resid		18.806
F-statistic	12.7883	Durbin-Watson stat		1.5530
Prob(F-statistic)	0.000016			04

Dari hasil Uji *Random Effect Model*, dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 39.5841244302 + 0.451701881097*LOG(X1) - 1.52459713907*LOG(X2) + eit$$

Keterangan:

- 1) X_1Y , dimana variabel belanja pendidikan (X_1) memiliki probabilitas sebesar 0,4978 atau lebih besar dari nilai signifikansi α 0,05 (5%) dan mempunyai nilai koefisien positif (+) sebesar 0,4517 yang berarti belanja pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung. Maka apabila belanja pendidikan naik sebesar 1% akan secara rata-rata akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,4517%.

- 2) X_2Y , dimana variabel Belanja Kesehatan (X_2) memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari nilai signifikansi α (5%) dan mempunyai nilai koefisien negatif (-) sebesar 1,5245 yang berarti belanja kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Maka apabila belanja kesehatan naik sebesar 1% akan secara rata-rata akan menurunkan kemiskinan sebesar 1,5425%.

Selanjutnya dilakukan pengujian pada koefisien determinasi, signifikansi secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) dengan hasil sebagai berikut:

a) Uji Signifikansi secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai Prob. dengan α (0,05). Apabila Prob. < 0,05, dapat dinyatakan bahwa variabel pengaruh secara individual terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *random effect model* dapat dilihat nilai t-statistik dari masing-masing variabel bebas yaitu:

- i. Variabel Belanja Pendidikan (X_1) dengan nilai Prob. sebesar 0,4978 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Belanja Pendidikan secara individu berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan.
- ii. Variabel Belanja Kesehatan (X_2) dengan nilai Prob. sebesar 0,0000 yang berarti nilainya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Belanja Kesehatan secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

b) Uji Signifikansi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara

bersama-sama. Berdasarkan hasil regresi data panel bahwa nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,0000, nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi α (5%) sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel bebas yaitu belanja Pendidikan dan belanja kesehatan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan sebagai variabel dependen.

c) Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square dengan nilai berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil Uji R-Square pada gambar 4.2, nilai R^2 sebesar 0,249341. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel X_1 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan) dan X_2 (Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan) sebesar 24,93%, sedangkan 75,07% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi seperti IPM, PDRB, dana desa, ataupun bantuan sosial.

C. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diperoleh nilai koefisien sebesar 0,4517 dengan arah koefisien yang positif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar $0,4978 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dalam

penelitian ini pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki arah koefisien positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Lampung. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Idris, dkk yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y). Hasil regresi data panel menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan dan kemiskinan, artinya ada ketidaksesuaian teori kemiskinan Menurut Kuznets dalam Todaro pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan dasar dari tujuan pembangunan.¹⁰⁵ Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Artinya tidak ada kesesuaian teori kemiskinan Michael P. Todaro dengan hasil analisis data yang dilakukan di Provinsi Lampung.

Hasil dari penelitian ini adanya hubungan positif disebabkan karena terdapat pemda yang mengalokasikan pengeluaran fungsi pendidikan di bawah 20 persen hal ini yang menyebabkan berkurangnya arah alokasi dana yang membiayai dan meningkatkan pelayanan umum. Hal ini menyebabkan permasalahan kemiskinan tetap mengalami peningkatan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, besarnya persentase pertumbuhan belanja fungsi pendidikan senantiasa berfluktuasi dan terdapat 4 pemda yang

¹⁰⁵ A. B. M Bintang and N. Woyanti, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)," *Media Ekon. Dan Manaj.* 33 (2018).

mengalami penurunan. Adapun yang menjadi penyebab turunnya belanja fungsi pendidikan pada tahun 2020 adalah adanya realokasi anggaran pendidikan yang dialihkan untuk penanganan covid 19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palenewen yang juga menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mengatasi kemiskinan.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil uji regresi data panel, variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan diperoleh nilai koefisien sebesar $-1,5245$. dengan arah koefisien yang negatif. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa nilai taraf signifikan sebesar $0,0000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan memiliki arah koefisien negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi Lampung. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septriani yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y).¹⁰⁶ Dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari banyaknya fasilitas Kesehatan dan pembiayaan pemerintah untuk melayani Masyarakat kurang mampu. Selain itu, jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal

¹⁰⁶ Septriani, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2023).

Perimbangan Keuangan, besarnya persentase pertumbuhan belanja fungsi kesehatan senantiasa meningkat walaupun ada beberapa pemda yang mengalami penurunan. Artinya, ketika belanja kesehatan meningkat, maka kemiskinan akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Menurut World Bank hal ini disebabkan karena kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kemiskinan. Jika kesehatan seseorang buruk, maka produktivitas orang tersebut akan mengalami penurunan, sebagai akibatnya orang tersebut akan mengurangi bahkan akan menghabiskan tabungan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kualitas hidup orang tersebut lama kelamaan akan semakin menurun, dan pada akhirnya orang tersebut akan jatuh miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan rumah tangga atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mulyadi, mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai macam sumberdaya yang ada dan adanya ketidakmampuan dalam memanfaatkan peluang-peluang yang menjadi haknya.

Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan pengeluaran pada sektor kesehatan dari tahun ke tahun, yaitu dengan mengelola pengeluaran sektor kesehatan bagi rakyat kecil melalui program-program yang telah ada dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan metode *Random Effect Model*, dimana menggunakan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) diperoleh hasil dengan nilai probabilitas (F-Statistic) sebesar 0,0000 lebih besar dari signifikansi 0,05. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang

Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

Sedangkan hasil analisis regresi data panel didapat nilai R^2 sebesar 0,249341. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebesar 24,55%, sedangkan 75,07% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi. Nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 0,4517 menunjukkan apabila variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,4517 %. Artinya, terjadi hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Kemiskinan.

Sedangkan, nilai koefisien variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan sebesar -1.5246 menunjukkan apabila variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel Kemiskinan (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.5246 %. Artinya, terjadi hubungan negatif antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan Kemiskinan.

Teori Keynes beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hubungan belanja publik dengan pertumbuhan ekonomi, Keynes berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi menyebabkan peningkatan permintaan agregat, dan pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bidang Pendidikan, maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan mengiringi penurunan kemiskinan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Bintang and Woyanti, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)." *Media Ekon. Dan Manaj.* 33 (2018).

Pengeluaran Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Namun jika pengalokasian fungsi pendidikan di bawah 20 persen hal ini yang menyebabkan berkurangnya arah alokasi dana yang membiayai dan meningkatkan pelayanan umum. Hal ini menyebabkan permasalahan kemiskinan di Lampung tetap mengalami peningkatan. Selain itu, jika dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, besarnya persentase pertumbuhan belanja fungsi pendidikan senantiasa berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Adapun yang menjadi penyebab turunnya belanja fungsi pendidikan pada tahun 2020 adalah adanya realokasi anggaran pendidikan yang dialihkan untuk penanganan covid 19.

Faktor lain penentu penurunan kemiskinan yaitu kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan Kesehatan. Ketika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat, maka kemiskinan akan mengalami penurunan, dan sebaliknya. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan provinsi Lampung senantiasa memiliki peran yang baik dalam penurunan tingkat kemiskinan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, hal ini dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung.

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan secara simultan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 dalam Persepektif Ekonomi Islam

Faktor penyebab kemiskinan tidaklah tunggal bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena

faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga disebabkan karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam Masyarakat, seperti yang diperlihatkan kemiskinan secara struktural.¹⁰⁸

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan yaitu dukungan anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan Kesehatan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah harus dijalankan dengan Amanah, karena pemimpin mempunyai tanggung jawab terhadap umatnya untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di daerahnya. Dengan pemerintahan yang berjalan Amanah dalam menyalurkan dana-dana anggaran belanja akan tercipta individu yang aktif, kreatif, masyarakatnya dapat hidup Sejahtera dan masalah kemiskinan tidak lagi menjadi budaya di negeri ini.

Pendidikan juga perlu ditunjang oleh Kesehatan fisik baik secara mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan.

¹⁰⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017), 17.

Prinsip ekonomi islam dalam menjalankan kebijakan pemerintah yaitu *adl* (keadilan) memberikan rasa adil terhadap kepentingan publik yang bertujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan manusia. Dalam Prinsip Ekonomi Islam *Al-Adl* dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan manusia. Rasa keadilan dan kesejahteraan manusia tersebut dapat tercipta melalui perantara pemimpin atau pemerintahan yang adil dan Amanah. Dijelaskan dalam Surah An-Nisa [4] ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا ۚ بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q. S. An-Nisa [4]: 58)

Tafsir dari Ibnu Katsir Juz 5 Halaman 336 Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, berupa nadzar, hak- hak sebagian hamba dengan hamba yang lain, titipan, dan selanjutnya Amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia ini maka akan Allah mintai pertanggungjawabnya di akhirat kelak.¹⁰⁹ Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa para pemimpin dan pemangku kekuasaan yang berkompeten sangat diperlukan sehingga mampu melindungi segenap bangsa Indonesia menuju kesejahteraan seperti yang dicita-citakan para pendirinya. Dari para pemimpipin yang adil akan

¹⁰⁹ Sobirin Bagus and Tutik Hamidah, “Profesionalisme Kerja Dalam Al-Qur’an: Urgensi Ilmu Dalam Menunjang Profesionalisme,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 47–62.

mendorong pengelolaan anggaran negara dan penyediaan pelayanan publik dasar yang memihak kepada rakyat banyak sehingga menciptakan kesejahteraan Masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.

Ekonomi Islam menjalankan kebijakan pemerintah yang adil dan Amanah sehingga tercipta kesejahteraan manusia. Dengan kata lain kebijakan pemerintah yang adil dan Amanah dapat mengurangi kemiskinan. Seperti Pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung bidang kesehatan yang mengurangi kemiskinan serta menciptakan fasilitas Kesehatan yang dibutuhkan dan selalu berusaha untuk mengalokasikan dana ke sumber-sumber yang berpotensi langsung mengurangi kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data panel, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 jika mengalami peningkatan maka angka kemiskinan masyarakat Provinsi Lampung akan bertambah, karena terdapat pemda yang mengalokasikan anggaran pengeluaran bidang pendidikan di bawah 20 persen dan Pemda di Provinsi Lampung senantiasa mengalami fluktuasi dalam mengalokasikan anggaran bidang Pendidikan, kemudian terdapat 4 pemda yang mengalami penurunan, sehingga kemiskinan tetap mengalami peningkatan.
2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 jika mengalami peningkatan maka angka kemiskinan masyarakat Provinsi Lampung akan berkurang, karena banyaknya fasilitas kesehatan dan pembiayaan pemerintah untuk melayani masyarakat kurang mampu dan Pemda di Provinsi Lampung senantiasa meningkatkan pengalokasian anggaran di bidang kesehatan, sehingga Kemiskinan di Provinsi Lampung selalu mengalami penurunan.
3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022 jika mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi kemiskinan masyarakat di Provinsi Lampung
4. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam perspektif Ekonomi Islam memiliki prinsip *Al-Adl* (keadilan) dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang adil dan Amanah. Pemda di Provinsi Lampung berusaha senantiasa untuk menerapkan prinsip *Al-Adl* (keadilan) yakni dengan selalu meningkatkan kapasitas anggaran pengeluaran

pemerintah dan fasilitas pelayanan bidang kesehatan sehingga kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung dapat menurun di setiap tahunnya, kemudian pengelolaan anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan harus selalu direview oleh setiap Pemda agar tercipta penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung setiap tahunnya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil uji analisis data panel, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah diatur didalam undang-undang. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program-program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di daerah.
2. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai dan meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam memperoleh data, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel penelitian dan periode waktu penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. "Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah," 2018.
- Aini, Riska. "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 1 (2020).
- Ananda, Candra Fajri. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan*. Universitas Brawijaya Press, 2018.
- Arifin, M Chairul. *BUKU KAMUS DAN RUMUS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN: Indonesia*. GITA Pustaka, 2018.
- Aris, M Abdul. *SELUK BELUK PERPAJAKAN INDONESIA: MENUJU UU CIPTA KERJA*. Muhammadiyah University Press, 2021.
- Ayu, Dyah Puspitaning. "ANALISIS PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018." *INDEPENDENT: Journal Of Economics* 1, No. 1 (2021): 12.
- "Badan Pusat Statistik (BPS)," 2021. <http://www.bps.go.id.%0A>.
- Bagus, Sobirin, and Tutik Hamidah. "Profesionalisme Kerja Dalam Al-Qur'an: Urgensi Ilmu Dalam Menunjang Profesionalisme." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 47–62.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish, 2017.
- Bintang, A. B. M, and N. Woyanti. "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)." *Media Ekon. Dan Manaj.* 33 (2018).
- Budiman, Arief. "Pengaruh Pengangguran, IPM, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2013." UII Yogyakarta, 2015.

- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2017.
- Darma, Budi. *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R²)*. Guepedia, 2021.
- Dima, Enike T Y, and Beatrix Seran. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kupang.” *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2020): 7–17.
- Febriana, Enny. “Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Perdesaan : (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi).” Universitas Indonesia, 2020.
- . “Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin Di Perdesaan: Studi Kasus Pada Rumah Tangga Petani Miskin Di Desa Cisaat Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.” Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi, 2010.
- Ferezagia, Debrina Vita. “Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018).
- Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariete SPSS 25.” Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- Gujarati, Damodar N. “Basic Econometrics. Forth Edition.” *Singapura: McGraw-Hill*, 2003.
- . *Essentials of Econometrics*. SAGE Publications, 2021.
- Herdaleny, Adelia. “Analisis Kapasitas Fiskal Dan Peranannya Terhadap PDRB (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)(Analysis Fiscal Capacity and Roles against PDRB (a Case Study District/Cities in East Java),” n.d.
- Hidayat, Agustri. “Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 4, No. 1 (2022): 2.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13308>.
- Hidayat, Agustri Yogi, and Zul Azhar. “Analisis Pengeluaran

- Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 4, no. 1 (2022): 65–74.
- Idris, Meila Putri Aisyah Idris, Ghina Fatimatuz Zahro, Nuri Nugraheni, and Aditya Kurniawan. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*, 2022.
- Iftitah, Andi Eka, and Puji Wibowo. “Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 1 (2022): 17–36.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Iqbal, Muhammad. “Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 5, no. 2 (2017).
- . “Regresi Data Panel (2): Tahap Analisis.” *Blog Dosen Perbanas* 2 (2015): 1–7.
- Isdanyo Istriana, Eupsi. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Ishomuddin. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Pers, 2005.
- Ismail, Ismail. “KEMISKINAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 110–34.
- Junierissa Marpaung. “Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan.” *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling* 5, No. 2 (2018): 55–64.
- Kanbur, R., & Squire, L. “The Evaluation of Thinking About Poverty. Exploring The Interactions,” 2010.
- Karim, H Adhiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*, 2007.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alurni, 1976.
- Khomsan, Ali, Arya H Dharmawan, Dadang Sukandar, and Hidayat Syarif. *Indikator Kemiskinan Dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kinanti, Rinanda. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan.” *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 249–59.
- Kusuma, Febri. “PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM,” n.d.
- Laksono, Richat Tri. “Efektifitas Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember.” *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 10, no. 2 (2016): 189–202.
- Lathifah, Ilhamatul. “Pengaruh Ipm, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Laju PDRB Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah.” *Jurnal Paradigma Multidispliner* 2, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1210/jpm.v2i4.146>.
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Erlangga, 2017.
- Malik. *Ekonomi Makro & Mikro*, n.d.
- Mangkoesebroto, Guritno. “Ekonomi Publik.” *BPFE, Yogyakarta*, 2001.
- Melati, Annisa Marni, and Dian Imanina Burhany. “Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.” *Indonesian Accounting Research Journal* 1, no. 3 (2021): 422–30.
- Mongan, Jehuda Jean Sanny. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2019): 163–76.

- Muliza, Muliza, Teuku Zulham, and Chenny Seftarita. "Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan PDRB Terhadap IPM Di Provinsi Aceh." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 3, no. 1 (2017): 51–69.
- Nenbee, Simeon G, Isimekhai Z Aleogho, Bariika N Vite, and Edafe E Otovwe. "An Empirical Investigation of Government Spending in Primary School Enrolment and Poverty Reduction in Nigeria." *International Journal of Research in Humanities and Social Studies* 8 (2021): 16.
- Niswara, Rika, Muhajir Muhajir, and Mei Fita Asri Untari. "Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap High Order Thinking Skill." *Mimbar PGSD Undiksha* 7, no. 2 (2019).
- Notoatmodjo, Soekidjo. "Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan." *Jakarta: Rineka Cipta* 193 (2012).
- Nur Rohani, Muhammad. "Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam," 2014.
- Palenewen, Themby O M, Een N Walewangko, and Jacline I Sumual. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018).
- Parsudi, Suparlan. "Kemiskinan Di Perkotaan." *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 1993.
- "Qur' an Kemenag," n.d.
- Rambe, Roosemarina Anggraini, and Purmini Purmini. "Kemampuan Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan: Bukti Empiris Dari Sumatera Dan Jawa." *Convergence: The Journal of Economic Development* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- Raymond, Raymond. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Propinsi Kepulauan Riau." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2017): 14–24.
- Roseline, Fanny Cantika, and Emi Maimunah. "Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Dan

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung.” *Cakrawala Repositori IMWI* 5, no. 2 (2022): 227–40.
- Rustanto. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Salesman, Frans. *POTRET KESEHATAN MASYARAKAT DI NUSA TENGGARA TIMUR*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Saragih, Megasari Gusandra, Liharman Saragih, Johannes Wilfrid Pangihutan Purba, and Pawan Darasa Panjaitan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar–Dasar Memulai Penelitian*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Septriani. “ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, No.1 (2023): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jep.v14i1.779>.
- Septriani, Septriani. “ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU.” *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 14, no. 1 (2023).
- Sigit, Tri Angga, and Ahmad Kosasih. “Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020): 105–19.
- Siswanto, Agus. “Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Bantul.” *Hanata Widya* 6, no. 7 (2017): 55–65.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Suharto, Edi. “Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Online*, [Http://www.Policy.Hu](http://www.Policy.Hu), 2006.
- . “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,” 2009.
- Sujarweni, V Wiratna. “Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.”

Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015.

Surjaningsih, Ndari, G A Utari, and Budi Trisnanto. "Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 14, no. 4 (2012): 389–420.

Suryawati, Chriswardani. "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 8, no. 03 (2005).

Susanti, Endah. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur." *ECO-BUILD; Economy Bring Ultimate Information All About Development Journal* 4, no. 2 (2020): 25–34.

Taruno, Hendrawan Toni. "Public Spending and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Economic Growth and Public Spending on Poverty Reduction in Indonesia 2009-2018." *The Indonesian Journal of Planning and Development* 4, no. 2 (2019): 49–56.

Todaro, Michael P. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga I*. Erlangga, 1999.

Todaro, Michael P, and Stephen C Smith. "Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Jilid 1." *Edisi Kedelapan, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.*

Ubur, Hubertus. "Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur)." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 2 (2011): 209–24.

Ulya, Husna Nimatul. "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional." *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 129–53.

UNDP, United Nations Development Programme. *World Youth Report*. New York: United Nations Development Programme, 2003.

Utami, Farathika Putri. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomika* 4, no.

2 (2020): 101–13.

“UU No. 20 Tahun 2003,” n.d.

“UU No 36 Tahun 2009,” n.d.

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Wardhana, Adhitya, and Bayu Kharisma. “Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1343–66.

Widodo, Adi, Waridin Waridin, and Johanna Maria Kodoatie. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2011): 25–42.





1. Hasil Analisis Data Panel

a. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	193.242878	(15,62)	0.0000
Cross-section Chi-square	309.282194	15	0.0000

b. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.370921	2	0.1854

c. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch Pagan

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 10/13/23 Time: 14:10

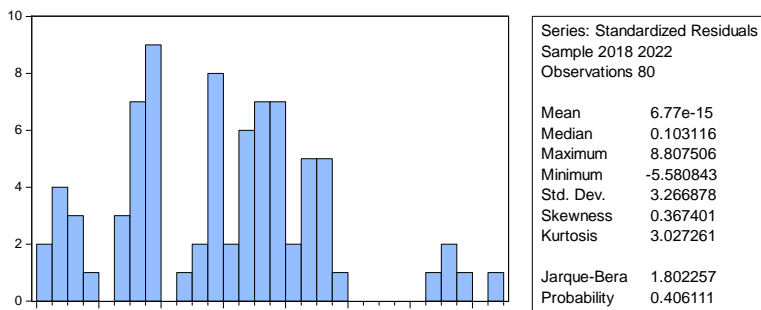
Sample: 2018 2022

Total panel observations: 80

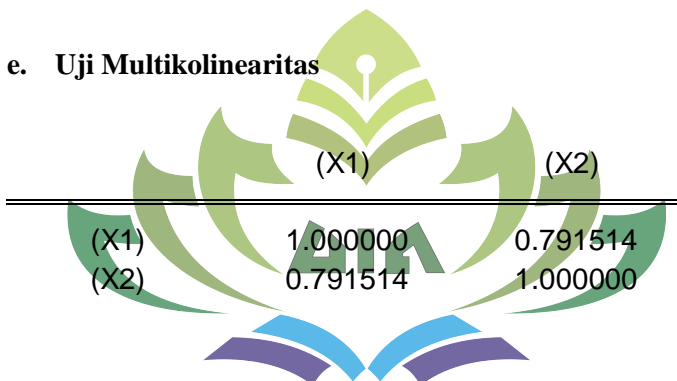
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	149.5579 (0.0000)	1.608764 (0.2047)	151.1667 (0.0000)
Honda	12.22939 (0.0000)	-1.268370 (0.8977)	7.750609 (0.0000)
King-Wu	12.22939 (0.0000)	-1.268370 (0.8977)	4.484251 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	149.5579 (0.0000)

d. Uji Normalitas



e. Uji Multikolinieritas



f. Hasil Uji Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/13/23 Time: 21:32
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 16
 Total panel (balanced) observations: 80
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.58412	16.08970	2.460215	0.0161
LOG(X1)	0.451702	0.663122	0.681174	0.4978
LOG(X2)	-1.524597	0.313853	-4.857679	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.253654	0.9778
Idiosyncratic random			0.489870	0.0222
Weighted Statistics				
R-squared	0.249341	Mean dependent var	0.804846	
Adjusted R-squared	0.229844	S.D. dependent var	0.563149	
S.E. of regression	0.494212	Sum squared resid	18.80687	
F-statistic	12.78830	Durbin-Watson stat	1.553004	
Prob(F-statistic)	0.000016			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.026147	Mean dependent var	11.98038	
Sum squared resid	843.1268	Durbin-Watson stat	0.034641	

2. Data

Data Analisis Regresi Data Panel

PEMDA	Ta- hun	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Kab/ Kota di Provinsi Lampung	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Kab/ Kota di Provinsi Lampung	Kemis- kinan Provinsi Lam- pung
Prov. Lampung	2018	2,712,583,880,570	558,079,906,148	13.14
Prov. Lampung	2019	2,757,056,389,564	550,208,465,493	12.62
Prov. Lampung	2020	3,003,290,487,789,63	730,904,385,598.19	12.34
Prov. Lampung	2021	2,927,972,001,881.42	853,683,577,751.83	12.62
Prov. Lampung	2022	1,845,111,097,364	736,832,892,560	11.57
Kab. Lampung Barat	2018	296,857,503,313	166,003,273,802	13.54
Kab. Lampung Barat	2019	305,239,923,800	166,975,801,838	12.92
Kab. Lampung Barat	2020	286,095,553,121.00	179,325,840,394.84	12.52
Kab. Lampung Barat	2021	297,934,295,249.00	149,351,100,723.95	12.82
Kab. Lampung Barat	2022	331,078,690,898	204,129,984,386	11.71
Kab. Lampung Selatan	2018	619,280,929,056	270,264,257,086	14.86

Kab. Lampung Selatan	2019	673,960,651,403	338,767,508,268	14.31
Kab. Lampung Selatan	2020	661,847,552,715.83	398,385,536,976.97	14.08
Kab. Lampung Selatan	2021	644,275,054,728.28	416,195,254,692.68	14.19
Kab. Lampung Selatan	2022	674,100,910,400	390,312,790,025	13.14
Kab. Lampung Tengah	2018	888,446,142,851	196,554,229,003	12.62
Kab. Lampung Tengah	2019	909,436,779,415	239,027,304,337	12.03
Kab. Lampung Tengah	2020	873,176,226,588.00	267,619,052,001.88	11.82
Kab. Lampung Tengah	2021	918,768,593,070.00	308,161,679,775.53	11.99
Kab. Lampung Tengah	2022	1,015,494,529,316	338,657,563,821	10.96
Kab. Lampung Utara	2018	530,364,207,514	208,535,795,650	20.85
Kab. Lampung Utara	2019	570,915,345,110	207,197,889,052	19.90
Kab. Lampung Utara	2020	500,465,462,586.47	219,516,274,817.38	19.30
Kab. Lampung Utara	2021	493,492,301,902.00	190,913,751,724.52	19.63

Kab. Lampung Utara	2022	562,968,392,311	264,511,138,738	18.41
Kab. Lampung Timur	2018	748,447,211,955	177,042,422,375	15.76
Kab. Lampung Timur	2019	781,359,157,366	233,287,339,511	15.24
Kab. Lampung Timur	2020	706,513,827,306.00	284,411,061,239.56	14.62
Kab. Lampung Timur	2021	751,142,446,919.00	320,721,628,973.09	15.08
Kab. Lampung Timur	2022	807,591,040,803	318,832,769,785	13.98
Kab. Tanggamus	2018	509,654,969,550	148,660,652,741	12.48
Kab. Tanggamus	2019	536,185,971,728	178,504,594,702	12.05
Kab. Tanggamus	2020	543,578,734,714.00	204,406,773,097.62	11.68
Kab. Tanggamus	2021	552,819,611,881.00	218,816,961,366.00	11.81
Kab. Tanggamus	2022	585,391,287,255	267,728,212,850	10.98
Kab. Tulang Bawang	2018	266,287,028,462	158,770,858,520	9.70
Kab. Tulang Bawang	2019	312,090,056,258	164,155,901,442	9.35
Kab. Tulang Bawang	2020	296,239,525,419.00	208,570,887,170.81	9.33

Kab. Tulang Bawang	2021	306,295,592,338.76	207,098,423,418.19	9.67
Kab. Tulang Bawang	2022	338,936,733,397	236,558,994,435	8.42
Kabupaten Way Kanan	2018	364,425,550,996	159,170,349,387	13.52
Kabupaten Way Kanan	2019	393,625,982,076	168,085,784,345	13.07
Kabupaten Way Kanan	2020	406,161,473,295.46	369,250,021,773.25	12.90
Kabupaten Way Kanan	2021	386,228,124,590.57	181,156,490,351.15	13.09
Kabupaten Way Kanan	2022	430,684,049,725	217,598,978,311	11.76
Kota Bandar Lampung	2018	748,329,904,027	282,565,067,592	9.04
Kota Bandar Lampung	2019	705,775,031,688	298,887,529,066	8.71
Kota Bandar Lampung	2020	642,866,746,146.10	278,742,359,533.90	8.81
Kota Bandar Lampung	2021	642,740,880,481.80	311,954,813,166.40	9.11
Kota Bandar Lampung	2022	619,727,538,668	355,333,548,573	8.21
Kota Metro	2018	211,701,957,689	207,276,069,606	9.14
Kota Metro	2019	200,414,283,279	250,074,499,429	8.68

Kota Metro	2020	204,703,860,141.00	298,653,278,746.16	8.47
Kota Metro	2021	195,408,040,768.04	298,659,572,036.07	8.93
Kota Metro	2022	197,501,588,861	288,268,222,771	7.87
Kab. Pesawaran	2018	392,450,690,463	134,673,254,830	15.97
Kab. Pesawaran	2019	419,745,388,071	130,323,845,741	15.19
Kab. Pesawaran	2020	408,010,650,841.00	150,922,913,890.60	14.76
Kab. Pesawaran	2021	399,288,138,518.00	141,738,680,310.40	15.11
Kab. Pesawaran	2022	441,580,329,282	160,576,205,875	13.85
Kab. Pringsewu	2018	389,228,135,518	129,093,958,813	10.50
Kab. Pringsewu	2019	408,681,063,412	145,857,110,489	10.15
Kab. Pringsewu	2020	395,436,747,319.00	193,111,293,084.60	9.97
Kab. Pringsewu	2021	406,267,380,793.31	267,107,156,606.45	10.11
Kab. Pringsewu	2022	443,655,312,447	217,398,244,839	9.34
Kab. Mesuji	2018	156,643,095,581	71,158,771,757	7.55
Kab. Mesuji	2019	209,149,321,266	89,069,943,692	7.47
Kab. Mesuji	2020	196,019,432,223.00	141,272,652,540.81	7.33
Kab. Mesuji	2021	240,270,357,692.00	156,131,972,733.00	7.54
Kab. Mesuji	2022	253,103,268,256	187,571,368,754	6.84
Kab. Tulang Bawang Barat	2018	220,667,328,925	90,028,564,883	8.10

Kab. Tulang Bawang Barat	2019	256,549,319,581	89,414,019,464	7.75
Kab. Tulang Bawang Barat	2020	260,359,864,489.00	115,880,591,966.00	7.39
Kab. Tulang Bawang Barat	2021	246,708,817,080.00	100,401,676,189.70	8.32
Kab. Tulang Bawang Barat	2022	259,815,141,141	89,682,254,824	7.44
Kab. Pesisir Barat	2018	160,214,941,004	75,907,615,375	14.98
Kab. Pesisir Barat	2019	194,093,741,374	77,032,971,186	14.48
Kab. Pesisir Barat	2020	195,904,271,793.00	101,613,616,136.94	14.29
Kab. Pesisir Barat	2021	173,756,031,714.00	89,880,051,804.28	14.81
Kab. Pesisir Barat	2022	189,564,984,105	102,154,779,200	13.84



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 32 55 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
 KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT
 PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2018-2022**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
LULU IRMAYANTI	1951010392	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 20 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 11 Desember 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENGARUH
PENGELUARAN PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN
MASYARAKAT PROVINSI
LAMPUNG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE

Submission date: 11-Dec-2023 10:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2254939408

File name: TURNITIN-_LULU_IRMAYANTI.docx (174.54K)

Word count: 10808

Character count: 73941

2018-2022

by Perpustakaan Pusat

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP PENGENTASAN
KEMISKINAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PERIODE 2018-2022

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	djpb.kemenkeu.go.id Internet Source	2%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
5	dinaspppa.lampungprov.go.id Internet Source	1%
6	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
8	lib.ibs.ac.id Internet Source	1%

9	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
11	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
12	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unj.ac.id Internet Source	1%
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
15	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
16	newberkeley.files.wordpress.com Internet Source	1%
17	anzdoc.com Internet Source	1%
18	jom.untidar.ac.id Internet Source	1%
19	jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
20	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%

21	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	<1 %
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
23	ppid.lampungprov.go.id Internet Source	<1 %
24	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
25	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 <http://www.febi.uinlampung.ac.id> e-mail: febi@uinlampung.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lulu Irmayanti
 NPM : 1951010392
 Pembimbing Skripsi I : Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.Si
 Pembimbing Skripsi II : Okta Supriyaningsih, M. E. Sy
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Prov. Lampung Perspektif E.I. 2018-2023

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	5 Juli 2023	ACC Proposal		<i>[Signature]</i>
2.	16 September 2023	• Tambahkan Ayat Qur'an • Tidak Pakai Body Note		<i>[Signature]</i>
3.	21 September 2023	• Daftar pustaka dikelompokkan ex: Buku, Jurnal, Website, dll.		<i>[Signature]</i>
4.	27 Oktober 2023	• Tambahkan Jumlah Sampel ng font italic • Perbaiki ayat sesuai pedoman, beri tafsir & penjelasan, Sub bab di halaman selanjutnya		<i>[Signature]</i>
5.	30 Oktober 2023	• Simpulan sesuaikan dgn Rumusan M. • Tafsir Al-Qur'an dari Tokoh Islam		<i>[Signature]</i>
6.	3 November 2023			
7.	10 Nov '23	lanjutan Abstrak dll.		<i>[Signature]</i>
8.	23 Nov 23	Perbaiki Persembahan & kata pengantar.		<i>[Signature]</i>
9.	30 Nov 23	ACC Munasabah		<i>[Signature]</i>
10.				



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 <http://www.febi.uinlampung.ac.id> e-mail: febi@uinlampung.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lulu Irmayanti
 NPM : 1951010392
 Pembimbing Skripsi I : Hj. Mardiyah Hayati, S.P., M.S.I
 Pembimbing Skripsi II : Okta Supriyaningsih, M.E.Sy
 Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Provinsi Lampung Perspektif Ekonomi Islam Periode 2018-2022

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	30 Nov 23	Bab I - III lengkapi data, lihat pedoman, dan perbaiki footnote	✓	
2.	7 Des 23	Perbaiki kesimpulan	✓	
3.	8 Des 23	Acc Munafasyah	✓	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Biografi Penulis



Penulis bernama Lulu Irmayanti dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Mei 2001, penulis merupakan anak pertama dari buah cinta dan kasih sayang pasangan Bapak Eko Pratikno dan Ibu Sulasih. Penulis menempuh awal pendidikan di TK Al-Azhar pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar di SDN 2 Way Huwi Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013. Pada jenjang menengah pertama, penulis melanjutkan di SMP N 19 Bandar Lampung serta lulus dan mendapat ijazah pada tahun 2016. Selanjutnya pada jenjang pendidikan menengah akhir penulis menempuh di SMA N 13 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2019, setelah itu di tahun yang sama atas izin Allah *subhanahu wa ta'ala* penulis menduduki bangku perkuliahan dengan di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terfokus pada program studi Ekonomi Syariah.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023**

